



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

STUDI PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT MIKRO NAGARI (KMN) DI NAGARI SIALANG KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SKRIPSI



**FITRI YANI
0810221047**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2015**

**STUDI PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT MIKRO NAGARI (KMN)
DI NAGARI SIALANG KECAMATAN KAPUR IX
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

**OLEH
FITRI YANI
0810221047**

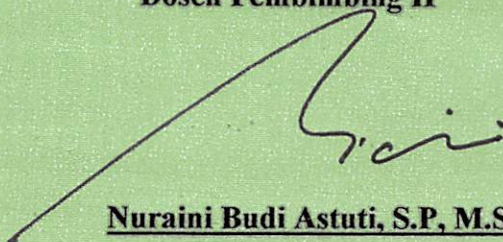
MENYETUJUI:

Dosen Pembimbing I



Ir. Hery Bachrizal Tanjung, M.Si
NIP. 196212251989031005

Dosen Pembimbing II



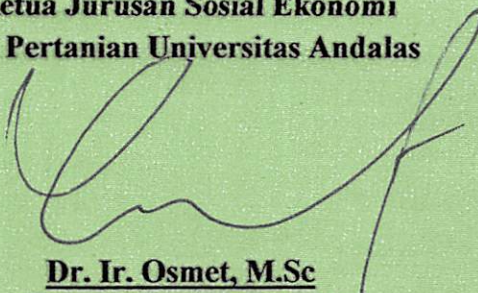
Nuraini Budi Astuti, S.P, M.Si
NIP. 197801192005012002

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**



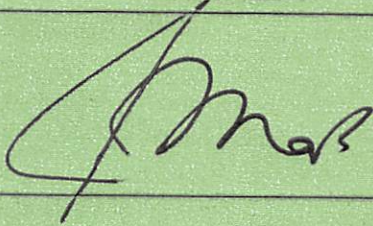



Prof. Ir. H. Ardi, M.Sc
NIP. 195312161980031004

**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian Universitas Andalas**



Dr. Ir. Osmet, M.Sc
NIP. 195510191987021001

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada tanggal 29 Januari 2015.

No	NAMA	TANDA TANGAN	JABATAN
1.	Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, PhD		Ketua
2.	Ir. Hery Bachrizal Tanjung, M.Si		Sekretaris
3.	Nuraini Budi Astuti, S.P, M.Si		Anggota
4.	Ir. Dwi Evaliza, M.Si		Anggota





"Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana".

(Q.S. Ali 'Imran ayat18)

Ya Rahman... Ya Rahim...

Dengan kemurahan, Rahmat serta kasih-Mu

*Sekeping keberhasilan dapat kugenggam, sepenggal asa dapat kuraih...
Perjalanan yang kutempuh penuh onak duri dan melelahkan, terbagi dalam suka maupun duka yang akhirnya sampai pada saat suatu tujuan yang tercapai.*

*Atas Ridho Mu Ya Rabb... dengan kerendahan dan ketulusan hati
kupersembahkan karya kecil ku ini buat orang – orang teristimewa dihatiku,
kedua orang hebat, yang selalu menyebut namaku dalam doanya, selalu memberi
semangat saat suka dan dukaku, yaitu ayah dan ibu ku tersayang (Yardinus (alm)
dan Samsi Warni), terima kasih yang tak terhingga atas do'a, kasih sayang,
pengorbanan, kesabaran dan ketulusannya dalam membimbingku. Aku minta
maaf karena terlambat dari waktunya ku persembahkan karya ini. Semoga dapat
membahagiakan ayah dan ibu serta menjadi apa yang ayah dan ibu harapkan
untuk menjadi manusia yang berguna setidaknya untuk hidupku sendiri dan orang
lain. "Senyuman ayah dan ibu adalah surga dan kebahagiaanku, kebahagiaan
ayah dan ibu adalah kesempurnaan hidupku".*

*Dan terimakasih buat kakak ku tersayang dan abang ku (Siis Nandeni dan Ujang)
yang selalu memberi ku dukungan baik moril maupun materil, jasa-jasa kalian
tidak akan pernah ku lupakan seumur hidupku. Buat adekku Gripo Biola tetap
semangat ya dek..kamu pasti bisa memperoleh gelar sarjana, semoga cepat
wisuda dan meraih apa yang kamu impikan.*

*Terima kasih untuk teman - teman, sahabat seperjuanganku agri 08, 09, 10, 11
yang tak dapat ku tuliskan satu persatu yang telah banyak memberikan motivasi,
saran serta semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini, hal ini tidak akan
mengurangi betapa berartinya kalian semua.*

*Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat, Aamiin ya
rabbal 'alamiin...*

BIODATA

Penulis dilahirkan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Kapur IX, Nagari Sialang pada tanggal 20 Juni 1989 sebagai anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara, dari pasangan Yardinus (Alm) dan Samsi Warni. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di SD Negeri 05 Sialang (1996-2002). Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditamatkan di SMP Negeri 2 Sialang (2002-2005). Untuk jenjang pendidikan selanjutnya penulis menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur IX (2005-2008). Pada tahun 2008, penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Jurusan Sosial Ekonomi, Program Studi Agribisnis.

Sejak tahun 2010 sampai tahun 2013, penulis aktif pada organisasi Forum Studi Dinamika Islam Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Forstudi FP-UA) dan Forum Kajian Islam Rabbani Universitas Andalas (FKI RABBANI-UA) sebagai anggota Bidang Keputrian (2011-2012) dan sebagai anggota pada Bidang Kesekretariatan (Kestari) (2012-2013). Selama 8 (delapan) semester di Fakultas Pertanian Universitas Andalas, penulis memperoleh beasiswa Eka Cipta Fondation.

Padang, Januari 2015

F.Y

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriringan salam disampaikan buat Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Skripsi ini disusun dari hasil penelitian dalam bentuk studi kasus dengan judul “Studi Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota”. Penulisan skripsi ini sebagai aplikasi ilmiah dari mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada Bapak Ir. Hery Bachrizal Tanjung, M.Si dan Ibu Nuraini Budi Astuti, SP, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, nasehat, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sama penulis sampaikan pula kepada Bapak Prof. Ir. Yonariza, M.Sc. PhD., Bapak Ferdhinal Asful, SP, M.Si dan Ibu Dwi Evaliza, M.Si yang telah memberikan saran-saran untuk perbaikan skripsi ini. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan teristimewa kepada kepada orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, serta teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian yang telah penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan informasi ilmiah terutama tentang kredit mikro nagari.

Padang, Januari 2015

FY

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	8
B. Kredit Dalam Pembangunan Pertanian.....	12
C. Usaha Kecil Menengah dan Mikro.....	14
D. Program Kredit Mikro Nagari.....	15
E. Evaluasi Program.....	17
F. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Waktu dan Tempat Penelitian	22
B. Metode Penelitian	22
C. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data.....	23
D. Topik Data	23
E. Analisa Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	25
B. Implementasi Program Kredit Mikro Nagari (KMN).....	28
C. Kasus Penunggakan KMN di Nagari Sialang	44

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 48

 A. Kesimpulan 48

 B. Saran 48

DAFTAR PUSTAKA 49

LAMPIRAN 51

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Nagari Sialang	26
2. Penggunaan Tanah di Nagari Sialang	27
3. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan Program KMN di Nagari Sialang dengan PTO KMN	36
4. Kesesuaian Tahap Pengawasan Program KMN di Nagari Sialang dengan PTO KMN	40
5. Kesesuaian Tahap Pelaporan Program KMN di Nagari Sialang dengan PTO KMN	42
6. Jumlah Peminjam yang Menunggak	45
7. Alokasi Penggunaan KMN Nagari di Nagari Sialang	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Mekanisme Penyaluran Dana	33

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Matrik Data Set	51
2. Daftar Angsuran KMN Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Tahun 2013	53
3. Nagari Penerima Program KMN di Kecamatan Kapur IX Tahun 2013	55
4. Realisasi Pinjaman KMN Berdasarkan Jenis Usaha, alokasi dana serta alasan menunggak	56
5. Daftar Nama Kelompok Penerima Dana KMN Tahun 2009	58

**STUDI PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT MIKRO NAGARI (KMN)
DI NAGARI SIALANG KECAMATAN KAPUR IX
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program KMN dan kasus penunggakan pengembaliannya. Metode penelitian adalah studi kasus (*case study*) tentang pelaksanaan program KMN di Nagari Sialang yang dinilai bermasalah karena adanya sejumlah kasus pengembalian kredit yang macet. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan selama satu bulan, antara Agustus – September 2014. Data primer yang dikumpulkan diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan kunci (*key informant*) yaitu ketua Pokja KMN Sialang dan perangkat Nagari. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait program KMN yang kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum program KMN di Nagari Sialang memang belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari ada beberapa kegiatan yang kurang sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yaitu 1) keterlambatan penyusunan dan pengajuan dokumen pencairan dana KMN yang mengakibatkan ketidaklancaran penyaluran kredit, 2) ketiadaan pemberian sanksi, dan 3) kelemahan pengawasan, serta pelaporan yang tidak tepat waktu. Kasus penunggakan KMN di Nagari Sialang disebabkan oleh penggunaan dana KMN yang tidak tepat. Untuk itu, penelitian ini menyarankan kepada KMN untuk sebaiknya melaksanakan program sesuai dengan petunjuk teknis operasional yang telah ditetapkan Pemerintah. Selanjutnya, perlu dilakukan pengawasan yang kuat dari tokoh nagari dan jorong agar pelaksanaan program bisa lebih terarah sehingga program yang diberikan kepada masyarakat tidak sia-sia. Diberlakukan aturan dan sanksi yang tegas, sehingga resiko yang timbul dalam pelaksanaan dan pengembalian dana KMN dapat diminimalisir.

STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF MICRO CREDIT PROGRAM (KMN) IN NAGARI SIALANG, SUMDISTRICT OF KAPUR IX DISTRICT OF LIMA PULUH KOTA

Abstract

The purpose of this study is to describe the implementation of the micro credit program (KMN) and credit debts cases. The research uses a case study method on the implementation of the KMN program in Nagari Sialang, that has significant problems on its credit debts. This study was conducted for one month, from August to September 2014. The primary data were collected through semi-structured interviews with key informants are the chairman of the Working Group and the nagari leaders. While, the secondary data were collected from the relevant agencies with KMN program and, then was analyzed using qualitative descriptive analysis. The result shows that generally, the implementation of KMN program in Nagari Sialang did not work very well, because such activities were not implemented according to the Technical Instructions Operations (PTO), as: 1) the lateness of preparation and submission process of credit documents have resulted the delay of credit distribution process, 2) the unimplemented sanctions, 3) the weakness of monitoring process and late reporting. Cases of credit debts in Nagari Sialang are mainly caused by the improper uses of the credit funds. Therefore, this research recommends to the KMN program to implement the program according to its technical set by the Government. Moreover, there should be strong monitoring action from the Nagari and Jorong leaders in order to direct the program for the benefit of the local people. Imposed strict rules and sanctions in order to avoid risks from the returning flow of the funds from the creditors.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan terbesar pembangunan di abad ini. Hal tersebut tertuang dalam Millenium Development Goals yang disepakati oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) berupa target bersama dari 180 negara untuk mengurangi separuh jumlah penduduk miskin dunia dalam periode 2000 – 2015. Di Indonesia, keberpihakan terhadap masalah kemiskinan diawali dengan landasan konstitusi kita UUD 1945 yang menggariskan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan tersebut di atas akan terwujud bila masalah pembangunan berupa kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan dapat di atasi (Sumodiningrat, 2003:12).

Berdasarkan penyebabnya, Pakpahan (1993) membagi kemiskinan menjadi tiga golongan yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan natural, dan kemiskinan relatif. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur yang membelenggu masyarakat untuk maju secara keseluruhan, kemiskinan natural adalah kemiskinan sebagai akibat dari terbatasnya sumberdaya alam yang dimiliki oleh masyarakat, dan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang disebabkan oleh situasi komparasi antara satu individu dengan individu lain, kelompok masyarakat dengan individu, kelompok masyarakat dengan masyarakat lain. Oleh sebab itu, menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai suatu prioritas dalam pembangunan merupakan hal yang sangat positif. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat petani miskin dipedesaan berupa pengaplikasian program pembangunan diperlukan kebijakan yang spesifik (Nurmanaf, 2009:110).

Jumlah penduduk miskin yang tinggi menuntut dilakukan langkah-langkah konkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut. Oleh karena itu, menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai suatu prioritas dalam pembangunan merupakan hal yang sangat positif. Dengan kata lain diperlukan kebijakan yang

spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat petani miskin di pedesaan, berupa pengaplikasian program pembangunan. Bila tidak, hal ini akan membuka peluang munculnya permasalahan yang dapat mengancam proses keberlanjutan pembangunan itu sendiri (Nurmanaf, 2009:111).

A.T Mosher telah menganalisa syarat-syarat pembangunan pertanian di banyak Negara dan menggolong-golongkannya menjadi syarat-syarat mutlak dan syarat-syarat pelancar. Terdapat lima syarat yang harus ada dalam pembangunan pertanian. Kalau salah satu saja syarat-syarat tersebut tidak ada, maka terhentilah pembangunan pertanian, pertanian dapat jalan terus tetapi sifatnya statis.

Syarat-syarat mutlak yang harus ada dalam pembangunan pertanian (A.T Mosher, 1965:77) adalah 1) Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani, 2) Teknologi yang senantiasa berkembang, 3) Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, 4) Adanya perangsang produksi bagi petani, 5) Tersedianya perangkutan yang lancar dan kontinyu. Disamping syarat mutlak diatas, terdapat lima syarat lagi yang adanya tidak mutlak tetapi kalau ada benar-benar akan memperlancar pembangunan pertanian. Yang termasuk dalam syarat-syarat pelancar (A.T Mosher, 1965:149) adalah 1) Pendidikan pembangunan yaitu bagaimana mendidik petani untuk mengambil manfaat dari masyarakat lain dimasa lampau yang dapat membantu masyarakat itu maju dan berkembang sesuai yang dikehendaki, 2) Kredit produksi adalah meminjamkan sejumlah dana untuk membiayai usaha tani petani dalam rentang waktu saat pembelian sarana produksi dan saat penjualan hasil panen, 3) Kerjasama kelompok petani, 4) Memperbaiki dan memperluas tanah pertanian, 5) Perencanaan nasional pembangunan pertanian yaitu proses pengambilan keputusan oleh Pemerintah tentang apa yang hendak dilakukan mengenai tiap kebijaksanaan dan tindakan yang mempengaruhi pembangunan.

Menurut Jhingan (1999:75), hambatan yang paling erat berkaitan dengan perkembangan ekonomi adalah kelangkaan modal. Kemiskinan merupakan penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara. Sebab utama kekurangan modal adalah kecilnya tabungan atau kurangnya investasi didalam produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena pendapatan perkapita rendah, penduduk tidak dapat menabung

banyak, sehingga bagian yang tersisa untuk investasi lebih lanjut hanya sedikit. Hal ini mengakibatkan produktivitas masyarakat dalam berusaha menurun.

Modal merupakan masalah utama yang selalu muncul dalam upaya pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat baik melalui penerapan teknologi maupun melalui penggunaan inovasi selalu terkendala oleh kelangkaan modal. Telah banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan telah banyak sistem yang dikembangkan untuk penguatan modal masyarakat, tetapi selalu kandas di tengah jalan. Mulai dari KUT (Kredit Usaha Tani), Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) dan lain sebagainya. Semua itu belum banyak yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan belum banyak yang berhasil memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat, apalagi untuk menciptakan dan menguatkan kemandirian masyarakat (Daniel, 2007:25).

Tidak efektifnya pelaksanaan program berupa bantuan dana ini diakibatkan karena rendahnya kesadaran dan lemahnya hukum yang berlaku serta kurangnya bimbingan dan pengawasan dalam pemanfaatan bantuan. Masyarakat tidak merasa rugi bila bantuan yang diberikan tidak bisa menghasilkan sesuatu begitu juga mereka tidak merasa mempunyai beban bila hutang tersebut harus dibayarkan kembali (Daniel, 2007:27).

Menurut Robinson *dalam* Wijono (2005:2), pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, termasuk didalamnya adalah program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana dan tentu saja adalah melalui pinjaman dalam bentuk *micro credit*. Pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, ketika pinjaman diberikan kepada mereka yang sangat miskin, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali. Hal ini wajar saja, mengingat mereka tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Program pangan dan penciptaan lapangan kerja lebih cocok untuk masyarakat sangat miskin tersebut. Sedangkan sebagian masyarakat lain yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi atau masyarakat yang berpenghasilan rendah, mereka memiliki

penghasilan meskipun tidak banyak. Untuk itu diperlukan pendekatan, program subsidi atau jenis pinjaman mikro yang tepat untuk masing-masing kelompok masyarakat miskin tersebut.

Menyediakan dana bagi penduduk Indonesia yang miskin dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk hal itu, dengan mensubsidi skema-skema kredit untuk pengusaha kecil, namun berbagai skema tersebut tidak menunjukkan hasil yang berarti. Beberapa penyebabnya adalah desain program yang buruk, insentif yang tidak tepat, dan kurangnya dukungan bagi organisasi-organisasi yang berbasis komunitas untuk mengelola dana tersebut. Walaupun kebanyakan skema dirancang agar dapat berlanjut dengan sendirinya, dimana pinjaman baru seharusnya didanai oleh pembayaran pinjaman, pada kenyataannya tidaklah begitu (World Bank, 2005).

Dalam rangka implementasi agenda pembangunan yaitu agenda ke 6 (enam), “Mempercepat Penurunan Tingkat Kemiskinan” yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2010, maka salah satu upaya penurunan tingkat kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Provinsi adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin melalui penyediaan kredit mikro nagari (Juknis KMN, 2009).

Pengertian pemberdayaan dalam konteks ini adalah memberikan bantuan modal usaha tetapi diiringi dengan pertanggung jawaban produktif melalui proses positif (jujur, produktif, kerja keras dan memahami arti kerja usaha). Pendampingan oleh Pemerintah Nagari dan kelompok usaha yang terus menerus membimbing rumah tangga miskin akan membawa mereka mampu menjadi orang yang produktif. Kedekatan kekerabatan dalam lingkup nagari juga akan membangkitkan kepedulian semua orang akan upaya penanggulangan kemiskinan (Juknis KMN, 2009).

B. Perumusan Masalah

Kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan di pedesaan melalui program KMN dimaksud untuk memberikan stimulus modal usaha bagi keluarga miskin ditingkat nagari agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Salah satu yang belum tersentuh program-program nasional adalah

intervensi modal usaha bagi masyarakat miskin yang bisa lebih mempercepat lagi kebangkitan mereka dari garis kemiskinan dan kemudian diharapkan mampu berdiri sendiri. Program KMN di maksud untuk memberikan stimulus modal usaha bagi masyarakat di nagari-nagari agar mereka cepat keluar dari garis kemiskinan.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya di Kecamatan Kapur IX terdiri dari 7 nagari yang mana salah satu nagarinya adalah Nagari Sialang yang terdiri dari 4 Jorong yaitu Jorong Sialang Atas, Jorong Sialang Bawah, Jorong Ronah Bengkek, Jorong Lubuk Koto dengan jumlah keluarga miskin pada tahun 2013 adalah sebesar 500 KK, untuk itu diperlukan program yang dibutuhkan masyarakat untuk keluar dari kondisi kemiskinan, dimana yang berjalan saat ini adalah program Kredit Mikro Nagari (KMN). Alokasi dana KMN ini sebesar Rp.300.000.000 untuk nagari ini, kemudian pemerintah nagari yang membuat suatu perencanaan dan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan inisiatif, kreatifitas, dan mengakomodasikan kondisi wilayah, potensi dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan musyawarah nagari penentuan kriteria penerima kredit mikro adalah individu yang berasal dari keluarga miskin (berdasarkan data BPS) yang memiliki kemauan dan kemampuan usaha, sedangkan untuk pemula diharapkan bergabung dengan kelompok usaha sejenis, mempunyai tanggungan keluarga yang banyak, diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang telah ada yang tidak bermasalah dengan penggunaan dana bergulir dimasa lalu, mendapat persetujuan dari institusi, lembaga atau kekerabatan setempat, mempunyai usaha ekonomi produktif, kelompok yang telah mendapat bantuan dari instansi lain tidak diprioritaskan menerima dana KMN. Diharapkan dari penentuan kriteria individu ini akan mempercepat tercapainya maksud, tujuan dan sasaran dari bantuan Kredit Mikro Nagari (Juknis KMN,2009).

Program Kredit Mikro Nagari (KMN) dengan sistem pinjaman modal bergulir ini mulai di implementasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Lima Puluh Kota di Nagari Sialang pada bulan April 2009 – sekarang. Tujuan dari program KMN ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dalam usahanya yang dilaksanakan melalui pola dana bergulir

dari satu kelompok ke kelompok lain. Meskipun kriteria penerima dana KMN telah disepakati bersama, namun sejauh ini masih ada penerima dana KMN yang tidak mematuhi peraturan yang telah disepakati, sehingga menimbulkan gangguan pada sistem perguliran, dan dalam pelaksanaan program KMN masih ada masyarakat yang tidak berhak menerima dana tersebut namun tetap mendapatkan bantuan, hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dana KMN yang sifatnya pinjaman bergulir harus dikembalikan dengan cara mencicil. Berbagai masalah dalam implementasi pengembalian, terutama masalah macetnya pembayaran cicilan yang dilakukan oleh penerima dana KMN ini. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti :

1. Bagaimana pelaksanaan program KMN di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa alasan penunggakan pengembalian dana KMN di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“STUDI PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT MIKRO NAGARI (KMN) DI NAGARI SIALANG KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program KMN di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX berdasarkan JUKNIS KMN 2009.
2. Mendeskripsikan kasus penunggakan pengembalian kredit mikro nagari (KMN) di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

1. Pemerintah, dapat dijadikan sebagai suatu masukan dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat dimasa yang akan datang.
2. Mampu memberikan sumbangan yang berkaitan dengan perkreditan mikro nagari.

3. Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa/peneliti selanjutnya.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit

Menurut Kasmir (2002:102), pengertian kredit di dalam Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan Kredit adalah pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan (Hadiwidjaja dan Wirasasmita, 2002:25).

Kata kredit sering diartikan dengan pengertian modal (kapital) dan terkadang juga diartikan dengan usaha yang biasanya dikaitkan dengan pemberian kredit. Pemberian kredit sebenarnya tidak sama dengan modal, tetapi kredit tersebut memang dapat digunakan untuk keperluan pembelanjaan/industri dalam usaha (bisnis) atau dapat pula dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumen maupun barang input untuk tujuan produksi (Weni, 2008:7).

Menurut J. A. Lavy, merumuskan arti kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Drs. Muchdarsyah Sinungan, kredit adalah suatu prestasi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dimana prestasi akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga (Hadiwidjaja dan Wirasasmita, 2002:26).

Ada beberapa unsur penting dalam kredit, yaitu: (1) kepercayaan, yang dimaksud dengan kepercayaan dalam kredit adalah adanya suatu bentuk keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik berupa uang, barang dan jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang, (2) kesepakatan, yang mana dalam hal kredit kesepakatan ini dilaksanakan dengan adanya hitam diatas putih yaitu

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing dalam sebuah kesepakatan dan perjanjian, (3) Jangka waktu, yang mana dalam hal ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, (4) Resiko, faktor kerugian dapat disebabkan oleh dua hal yaitu kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja akibat terjadinya musibah, dan (5) Balas jasa, yang mana keutuhan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang disebut dengan bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pihak bank (Kasmir, 2002:103).

Fungsi kredit dijalankan untuk berbagai kegunaan, yaitu: (1) Kredit dapat memajukan arus alat tukar barang dan jasa, jika suatu saat belum tersedia uang sebagai sebagai alat pembayaran maka barang atau jasa tersebut dapat dimiliki melalui kredit, (2) Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran, bila kelebihan dana pada orang yang memiliki pendapatan besar dari kebutuhannya dipindahkannya pada orang yang memiliki pendapatan lebih kecil dari kebutuhannya maka itu lebih efektif, (3) Kredit dapat digunakan sebagai alat pengendali harga. Fisher Equation menyatakan uang beredar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga. (4) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru, serta (5) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi yang dimilikinya (Hadiwidjaja dan Wirasasmita, 2002:28).

Hadiwidjaja dan Wirasasmita (2002:30), menyatakan bahwa dilihat dari kegunaannya, kredit terdiri dari kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit produktif adalah kredit yang diberikan untuk memperlancar pembiayaan suatu usaha produktif. Sedangkan kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Mubyarto (1994:14), menyatakan bahwa dalam masyarakat pedesaan disatu pihak kita lihat keperluan akan kredit hampir tidak terpenuhi, sedangkan dilain pihak badan kredit formal kenyataan nya menyediakan sebagian kecil saja dari keperluan akan kredit tersebut. Salah satu penyebab pemberian kredit kepada petani dinegara-negara yang sedang berkembang karena kredit pertanian lebih

sedikit bagi keperluan produksi dan lebih banyak untuk keperluan konsumsi. Maka tidak heran lembaga perkreditan menolak pemberian kredit tersebut.

Menurut Kasmir (2002:91) Ada beberapa kriteria yang biasa digunakan oleh Bank sebelum memberikan kredit. Kriteria tersebut dikenal dengan istilah 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition of economy dan Collateral.

1. Character (karakter atau kepribadian)

Kredit bisa diberikan kepada calon nasabah yang memiliki kepribadian baik seperti bertanggung jawab, menepati janji, jujur, tidak berperikat sebagai penjudi, pencuri dan pemabuk. Informasi karakter ini dapat diperoleh dari teman, tetangga, Wali jorong, dan Wali Nagari serta Camat.

2. Capacity (kemampuan)

Kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjamannya dapat dilihat dari kinerjanya dalam mengendalikan, memimpin, dan menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik dan memberi untung (rendabel).

3. Capital (modal)

Melihat perbandingan antara jumlah utang dengan modal keseluruhan, maka bank bisa menilai apakah kredit layak diberikan atau tidak, karena kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan. Dengan adanya modal sendiri dari calon nasabah menunjukkan bahwa calon nasabah adalah pengusaha, yang untuk mengembangkan usahanya perlu bantuan dari pihak bank. Yang termasuk dalam kategori modal adalah uang tunai, harta lainnya yang mudah dicairkan dan yang sukar dicairkan.

4. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

Ada beberapa kondisi yang mempengaruhi pertimbangan pemberian kredit adalah: (1) Periode Siklus Ekonomi, (2) Peraturan Pemerintah, (3) selera pasar dan (4) waktu pemberian kredit khususnya untuk usaha pertanian. Apabila siklus ekonomi sedang berada pada periode resesi, maka kredit sebaiknya tidak diberikan. Sebaliknya apabila siklus ekonomi berada pada recovery (perbaikan) maka dianjurkan menyalurkan kredit sebanyak-banyaknya.

5. Collateral (Jaminan)

Jaminan bisa berbentuk harta benda, kelayakan usaha, jaminan pasar (kontrak pembelian) dan jaminan personal (*personal guarantee*). Jaminan yang sering dipraktekkan karena dianggap lebih mudah dan aman adalah petani sendiri berdasarkan atas asaz modern seperti koperasi kredit, Koperasi Unit Desa (KUD), lumbung kredit dan lain sebagainya.

Menurut Untung (2000:54), berdasarkan dari kolektibilitasnya dapat dibedakan menjadi:

1. Kredit lancar, yang dikatakan sebagai kredit lancar jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Tidak ada tunggakan angsuran pokok, bunga atau penarikan, b) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui satu bulan, atau belum melampaui tiga bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau melampaui enam bulan bila angsurannya ditetapkan empat bulan atau lebih, c) Terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui satu bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan, atau belum melampaui tiga bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.
2. Kredit kurang lancar, yang dikatakan sebagai kredit kurang lancar jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu bulan (tetapi belum melampaui dua bulan) bagi kredit yang masa angsurannya satu bulan atau melampaui tiga bulan (tetapi belum melampaui enam bulan) bagi kredit yang ditetapkan dua bulanan atau tiga bulanan atau melampaui enam bulan dan belum melampaui dua belas kredit yang masa angsurannya ditetapkan enam bulan atau lebih,
 - b) Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui lima belas hari kerja tetapi belum melampaui tiga puluh hari kerja, c) Terdapat tunggakan bunga yang melampaui satu bulan tetapi belum melampaui tiga bulan bagi yang angsuran kreditnya

satu bulan, atau melampaui tiga bulan tetapi belum melampaui enam bulan bagi angsurannya lebih dari satu bulan.

3. Kredit yang diragukan, yaitu kredit yang tidak memiliki kriteria lancar atau kurang lancar seperti yang terdapat pada poin-poin sebelumnya, tetapi kredit ini akan dapat diselamatkan tetapi kegunaannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang debitur.
4. Kredit macet, yang dikatakan dengan kredit macet adalah :
 - a) Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan seperti yang terdapat pada tiga poin sebelumnya, b) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada perlunasan, c) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negri atau Badan Urusan Piutang Negara (BPUN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit.

Suyatno (2003:37), menyatakan bahwa langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank adalah tahap-tahap permohonan kredit, penyidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit. Adakalanya beberapa kredit memiliki kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya.

B. Kredit Dalam Pembangunan Pertanian

Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian (Mubyarto, 1989:12). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus kepada sektor pertanian karena sebagian besar penduduk Indonesia khususnya hidup di daerah pedesaan dan umumnya mempunyai sumber kehidupan disektor pertanian (rumah tangga pertanian). Berdasarkan hal ini, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan dibidang pertanian dengan tujuan meningkatkan produksi, peningkatan pendapatan, dan taraf hidup petani.

Menurut Soekartawi (1989:57), menyatakan bahwa salah satu ciri pertanian rakyat Indonesia adalah manajemen dan permodalan yang terbatas. Modal dalam usahatani dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses produksi. Dengan demikian pembentukan modal mempunyai tujuan yaitu menunjang pembentukan modal lebih lanjut, dan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani.

Kesulitan permodalan yang dialami petani akan mempengaruhi ruang gerak aktifitas produksi usahatani dari petani. Salah satu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan pertanian pada khususnya adalah melalui kredit. Kredit sebagai salah satu syarat pelancar dalam pembangunan pertanian, karena tanpa adanya kredit, pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian akan berjalan lambat. Untuk produksi yang baik, petani harus lebih banyak mengeluarkan uang sarana produksi. Petani dengan uang banyak akan menghasilkan produksi yang lebih tinggi (Mosher, 1989:44).

Ciri khas kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan pendapatan dan pengeluarannya. Pendapatan petani hanya diterima setiap musim panen, sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap minggu atau kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak sebelum panen tiba (Mubyarto, 1989:35). Penciptaan modal untuk petani dapat dilakukan dengan menyisihkan kekayaan (menabung), akan tetapi pada umumnya petani jarang memiliki capital tinggi. Hal ini mengakibatkan investasi untuk usahatani selanjutnya sangatlah kecil karena akumulasi modal sangatlah sulit untuk dilakukan. Atas dasar inilah, pemerintah meluncurkan kebijakan perkreditan untuk membantu petani kecil mendapatkan modal sekaligus untuk mengembangkan usahanya. Kebijakan pemerintah mengenai program kredit usahatani, khususnya usahatani padi dan palawija, telah mengalami berbagai perubahan dalam pelaksanaannya.

Sejarah kredit pertanian diawali dengan adanya kredit program untuk padi Sentra pada tahun 1963 dan dilanjutkan dengan program Bimbingan Massal (BIMAS) pada tahun 1966 dan 1969 menjadi Bimas Gotong Royong. Pada tahun 1970 Bimas Gotong Royong diubah menjadi Bimas yang disempurnakan sampai dengan tahun 1985. Pada tahun 1985 kredit Bimas diganti dengan Kredit Usaha

Tani (KUT) , kredit program sektor pertanian tersebut digulirkan dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan program intensifikasi pertanian. Sejak dikeluarkannya UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk pendanaan kredit program (termasuk KUT), sehingga semua kredit program yang bersumber dari KLBI dihapuskan mulai dari tahun 2000. Sebagai pengganti skim pembiayaan pertanian maka diluncurkan skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP).

Kredit Usaha Tani (KUT) dalam Kredit Ketahanan Pangan (KKP), adalah kredit untuk usahatani tanaman pangan (padi dan palawija), tebu, peternakan, perikanan, dan pengadaan pangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi pertanian nasional dan meningkatkan pendapatan petani. Penyaluran KUT dan KKP relatif sama dengan beberapa penyesuaian pada tingkat pelaksanaan kredit. Perbedaan antara KUT dan KKP terletak pada sumber pendanaan dan tanggung jawab terhadap resiko kredit. Sumber dana KUT berasal dari KLBI dan resiko kredit ditanggung pemerintah, sementara sumber dana KKP berasal dari bank pelaksana sebesar 50 persen. Sisanya ditanggung oleh konsorsium (untuk KPP tanaman pangan), sementara KKP pada komoditas selain pangan resiko kredit sepenuhnya ditanggung bank pelaksana. Program KUT dan KKP dimaksudkan untuk membantu petani yang belum mampu membiayai sendiri usahataniannya agar dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya serta mewujudkan ketahanan pangan.

C. Usaha Kecil Menengah dan Mikro

Menurut Partomo dan Rachman (2002 : 27), Pengertian tentang usaha kecil menengah (UKM) tergantung pada konsep apa yang digunakan, maka dari itu pengertiannya tidak selalu sama. Mengacu kepada UU No.9 tahun 1995, kriteria usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya yaitu: (a) memiliki kekayaan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), (b) memiliki hasil penjualan paling banyak 1 Miliar/tahun. Sedangkan untuk kriteria usaha menengah yaitu: (a) untuk sektor industri memiliki total asset paling banyak Rp. 5 Miliar dan (b) untuk sektor non industri memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600.000.000,00 juga tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sejumlah 3 Miliar rupiah. Pada saat sekarang ini UKM masih banyak memiliki kekurangan dan kekurangan itu perlu untuk diatas melalui pendekatan secara komprehensif integral dilakukan melalui pembinaan berbagai aspek antara lain pasar, modal, teknologi, manajemen secara menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan dilakukan secara terpadu antar instansi.

Perkembangan perkreditan nasional merupakan cermin dari dinamika investasi disektor riil, sekaligus pemacu proses pematangan sistem ekonomi secara keseluruhan. Sumber-sumber dana yang tersalurkan kedalam investasi-investasi berbagai sector ekonomi menjadi pertanda bahwa sistem perekonomian berjalan atas dasar dukungan sector moneter. Alokasi dana perbankan baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya sangat mempengaruhi situasi investasi sehingga segala kebijakan perkreditan yang ada akan berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian secara langsung (Rika,2012:15).

Bank Indonesia memperkenalkan berbagai bentuk perkreditan untuk masyarakat lapisan bawah, maksudnya agar mereka memperoleh akses yang memadai terhadap dana yang ada. Sejumlah besar tenaga kerja terlihat dalam ragam usaha kecil dibidang pertanian, perdagangan, industri dan jasa lainnya. Kebijakan yang digariskan bank Indonesia untuk mengembangkan usaha kecil tidak saja untuk member kredit yang diperlukan, tetapi juga membantu masalah-masalah lain yang sangat terkait seperti: alternatif jaminan kredit, pengembangan kelompok, bantuan pemasaran, latihan, bimbingan teknis dan pengembangan sumberdaya manusia secara umum.

D. Program Kredit Mikro Nagari

Program Kredit Mikro Nagari adalah program penanggulangan kemiskinan ditingkat nagari dengan memberikan stimulan modal usaha bagi keluarga miskin ditingkat nagari agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Program KMN ini di buat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan sumber dana berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten. Dimana penyalurannya diberikan kepada Kabupaten untuk diteruskan pada Nagari/ Pokja Nagari untuk

didistribusikan kepada kelompok penerima yang telah disepakati pada forum musyawarah nagari. Strategi yang digunakan dalam penyaluran bantuan Kredit Mikro Nagari (KMN) adalah: (a) peningkatan partisipasi masyarakat miskin baik penduduk laki-laki maupun perempuan dalam proses pengambilan keputusan untuk memperoleh jaminan dan pemenuhan hak-hak dasar. Mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan partisipasi masyarakat serta terwujudnya keterbukaan, akuntabilitas/pertanggungjawaban, (b) pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kemampuan dalam mengelola potensi dan sumber daya sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat mendorong perekonomian yang berkelanjutan, (c) peningkatan kapasitas nagari, peningkatan kemampuan nagari sebagai unit pemerintahan terdepan dan kesatuan masyarakat hukum adat dalam meningkatkan ketahanan masyarakat dan pembangunan wilayah nagari. Selain itu meningkatkan peran dan fungsi lembaga masyarakat (BPD, LPM dan lembaga lainnya) dalam melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program-program nagari, (d) perluasan kesempatan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan aksesibilitas permodalan yang murah dan mudah dengan jaminan sosial dari masyarakat dan institusi nagari.

Pendekatan operasional yang digunakan dalam penyelenggaraan KMN adalah: (a) pelaksanaan program kredit mikro dilakukan dengan bertumpu pada kelompok masyarakat (*community based development*), (b) penentuan kelompok, prioritas kegiatan serta jenis usaha yang diselenggarakan melalui mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Nagari sesuai dengan karakteristik dan potensi sumber daya lokal, (c) pemberian kredit permodalan diprioritaskan bagi masyarakat atau kelompok masyarakat miskin yang telah dan sedang berusaha dalam skala kecil dan mikro, (d) KMN dilaksanakan melalui sistem bergulir dan bergilir dalam rangka memperluas capaian kelompok sasaran keluarga miskin, (e) optimalisasi peranan kelompok kerja, tenaga pendamping, pejabat pemerintah LSM dan pengelolaan Kredit Mikro Nagari, (f) pemanfaatan dan pemberdayaan keuangan lokal (BPR, LPN, Baitul Mal) sebagai penata usahaan keuangan program KMN, (g) peningkatan peran dan fungsi ninik mamak, bundo kanduang, alim ulama, tokoh masyarakat dan perantau dalam pengembangan jaminan sosial.

KMN diberikan kepada kelompok keluarga miskin nagari untuk mendukung ketersediaan modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatannya. Bidang usaha yang dibantu atau difasilitasi disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumber daya (sumber daya alam dan kapasitas sumber daya manusia) yang ada di nagari. Komponen kegiatan dibantu dan difasilitasi dengan program KMN, adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin yang ada pada nagari.
2. Kegiatan pendukung pelaksanaan Kredit Mikro Nagari, meliputi :
 - Biaya administrasi dan supervise bank
 - Biaya pendamping/fasilitas/pembinaan (SPMN)
3. Kegiatan operasional nagari untuk menunjang pengelolaan kredit mikro dan kegiatan pemerintahan di tingkat nagari.
4. Kredit Mikro Nagari tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sosial lainnya.

E. Evaluasi Program

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah suatu penilaian berkala terhadap relevansi, prestasi, efisiensi, dan dampak proyek dalam konteks tujuan yang disepakati. Evaluasi biasanya menyangkut perbandingan-perbandingan yang memerlukan informasi dari luar proyek tentang waktu, kawasan, atau populasi. Evaluasi menurut suatu analisis yang sistematis, objektif terhadap prestasi, efisiensi, dan dampak proyek dalam kaitannya dengan tujuan-tujuannya. Tujuan utama adalah bukan untuk menjatuhkan suatu keputusan tapi untuk menarik pelajaran dari pengalaman agar menyesuaikan strategi campur tangan proyek yang ada, mengubah proyek-proyek ini yang sedang berjalan, atau untuk memperbaiki rancangan proyek-proyek baru di masa yang akan datang (Casley, 1991:1). Evaluasi merupakan suatu cara untuk belajar dari upaya-upaya pembangunan guna memperbaiki proses pembangunan. Evaluasi mencoba untuk :

1. Secara kritis menguji kembali, dilihat dari sudut pembangunan berikutnya, rasional proyek yang dinyatakan dalam dokumen persiapan dan penilaian.

2. Menentukan memadainya proyek untuk mengatasi kendala yang telah diidentifikasi pada pertanian dan pembangunan pedesaan dan untuk mempromosikan perubahan-perubahan yang diinginkan.
3. Membandingkan hasil-hasil nyata yang dicapai dengan target yang telah ditentukan dan mengidentifikasi alasan-alasan terjadinya kekurangan dan kelebihan.
4. Menilai efisiensi proyek.
5. Menentukan pengaruh dan dampak proyek.
6. Menyajikan pelajaran berharga dan rekomendasi yang diambil dari pelajaran tersebut.

2. Proses Evaluasi

Casley dan Kumar (1991:3), menyatakan bahwa proses evaluasi memfokuskan kepada tiga bidang yaitu: keluaran, efek dan dampak, dan efisiensi ekonomi serta keuangan.

a. Prestasi

Prestasi merupakan suatu tinjauan umum terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh proyek untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ini dapat berkisar dari membangun prasarana fisik melalui nasehat teknis yang diberikan kepada petani sampai pada usaha untuk mempermudah pemasaran hasil-hasil yang dicapai. Suatu evaluasi prestasi menuntut suatu perhatian yang komprehensif pada proyek sejak awal sampai pada saat evaluasi. Biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi, persiapan, dan penilaian proyek

Tinjauan harus termasuk suatu penilaian atas studi-studi kelayakan yang pernah dilakukan, komitmen dan kemampuan badan-badan sponsor, memadainya laporan persiapan dan penilaian, serta waktu dan sumberdaya yang dicurahkan untuk itu.

2. Kekhususan proyek, tujuan, komponen kegiatan, target, dan model-model campur tangan yang mendasari proyek harus ditinjau kembali dengan manfaat untuk melihat kebelakang. Beberapa pertanyaan khusus yang harus dijawab oleh evaluasi adalah: bagaimana menentukan tujuan proyek? Apakah tujuan-tujuan itu sesuai dengan sasaran nasional? Apakah

komponen dan strategi proyek memadai untuk mencapai target? Apakah target realistik? Apakah model campur tangan pada dasarnya kuat?

3. Waktu dimulainya dan pelaksanaan proyek. Pertanyaan lazim untuk evaluasi adalah : apakah terjadi keterlambatan tidak lazim pada waktu dimulainya proyek? Kalau ya, apakah alasan dan kemungkinan-kemungkinan akibat untuk proyek? Apakah proyek mampu menyelesaikan berbagai kegiatan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
 4. Pelayanan dan masukan yang disediakan. Memadainya pengadaan pelayanan dan masukan yang disediakan oleh proyek merupakan suatu kunci bagi penilaian prestasi proyek. Pasokan diukur menurut target yang lebih dulu ditetapkan.
 5. Cakupan dan respon pemanfaat. Beberapa pertanyaan relevan adalah: apakah masukan dan pelayanan yang disediakan mencapai populasi target dalam jumlah yang diharapkan? Berapa proporsi populasi target yang benar-benar ditangani oleh proyek? Seberapa jauh kelompok target menggunakan masukan yang tersedia? Adakah mekanisme formal atau informal untuk partisipasi yang telah dibina?
 6. Prestasi manajemen. Keseluruhan prestasi manajer dinilai dengan menggunakan pertanyaan yang relevan yaitu: apakah mereka mampu mengawasi kegiatan-kegiatan proyek secara efektif? Apakah mereka membina kaitan yang perlu dengan badan-badan-badan pemerintah dan organisasi swasta? Apakah manajer berorientasi pada tugas? Apakah sumberdaya manusia dan materi digunakan secara tepat?
 7. Prestasi keuangan. Pengeluaran keuangan dibandingkan dengan table biaya dan anggaran yang asli untuk menguji apakah target-target keuangan dan perjanjian dalam persetujuan proyek dipenuhi dan apakah secara umum terdapat pengawasan keuangan yang memuaskan. Bagaimana biaya-biaya yang berlebih ditutup dan biaya yang kurang dikembalikan?
- b. Keluaran, efek dan dampak

Casley dan Kumar (1991:5), menyatakan bahwa fokus kedua untuk evaluasi adalah pada keluaran, efek, dan dampak proyek. Besar kemungkinan untuk semua kemungkinan untuk semua kegiatan dan tugas yang diharapkan dari

proyek perlu selesai secara memuaskan dalam waktu dan sumberdaya yang telah disepakati, namun belum menjamin adanya hasil-hasil yang diharapkan. Ketika proyek-proyek dilaksanakan, proyek pertanian dan pembangunan pedesaan menciptakan reaksi berantai yang tidak dapat selalu diperkirakan sebelumnya. Beberapa petani mungkin mendapat manfaat, tetapi lainnya dirugikan oleh kekuatan ekonomi yang timbul oleh bertambahnya manfaat semula dari reaksi yang berantai.

Lebih lanjut casley dan Kumar (1991:6), menjelaskan bahwa konsekuensi dari sebuah proyek tidak akan kelihatan dalam beberapa tahun. Banyak, terutama yang menyangkut perubahan dalam pola konsumsi, gizi, kesehatan, dan ketidakmerataan sosial dan ekonomi mungkin akan memakan waktu panjang untuk berkembang secara cukup guna memungkinkan suatu penilaian yang realistis.

c. Efisiensi ekonomi dan keuangan

Casley dan Kumar (1991:8), menyatakan bahwa evaluasi bermaksud untuk menentukan efisiensi proyek dengan menghitung tingkat imbalan keuangan ekonomi atas uang yang telah diinvestasikan pada proyek itu. Imbalan tersebut diperkirakan pada waktu persiapan dan penilaian proyek atas dasar model-model keluaran. Tujuan perhitungan kembali adalah untuk menentukan : pertama, apakah perkiraan awal, memang terbukti realistic. Kedua, alasan serta implikasi terhadap setiap variasi nyata.

F. Penelitian Terdahulu Terkait dengan Kredit Mikro Nagari

Penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan modal usaha dengan system kredit cukup menarik perhatian banyak pihak. Kajian seputar kredit mikro untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Weni (2008) tentang Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari Tahun 2007 di Nagari Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian tersebut bertujuan Mendeskripsikan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis nagari melalui Program KMN di Nagari Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman

dan Menganalisis masalah-masalah dalam pelaksanaan Program KMN di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ada beberapa hal dalam pelaksanaan Program KMN di Nagari Parit Malintang yang masih belum dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program, dimana ketidaksesuaian tersebut menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program KMN di Parit Malintang diantaranya: sosialisasi dilakukan dengan cara *door to door*, penilaian kelayakan usaha dilakukan dengan cara *prochecking*, sanksi tidak berjalan, pengawasan masih rendah dan pelaporan mengenai pengelolaan dana KMN Th 2007 ke BPM baru berlangsung satu kali. Di Nagari Parit Malintang ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan petunjuk teknis ini menimbulkan masalah-masalah terutama dalam pengembalian kredit diantaranya sosialisasi secara *door to door* membuka kesempatan bagi pelaksana memberikan dana kepada sanak family dimana persentasenya adalah 56,8% dan persentase tunggakan adalah 36,4%. Identifikasi penerima program tidak sesuai dengan juknis mengakibatkan salah sasaran dalam pemberian dana KMN antara lain dana diberikan kepada masyarakat dengan pengalaman berusaha <1 tahun 29,5% dengan persentase tunggakan 27,3%, umumnya penerima program berpendidikan rendah (tamat SD) dengan persentase 47,7% sedangkan yang menunggak 38,6%. Dalam penyusunan prioritas, pelaksana (wali Korong) masih memberikan dana kepada masyarakat yang tidak memiliki usaha (buruh/upahan) dengan persentase 18,2% dimana semuanya menunggak. Penilaian kelayakan usaha secara *prochecking*, hasil wawancara hanya 3 orang (6,8%) yang diverifikasi langsung oleh pokja, sedangkan 41 orang (93,2%) menjawab hanya dinilai oleh Korong, suatu kewajiban jika proses ini menghambat pelaksanaan Program KMN. Kesepakatan aturan bergulir tidak dilaksanakan sesuai petunjuk teknis karena sanksi sosial yang ditetapkan tidak dijalankan. Penyusunan dan pengajuan dokumen pencairan dana terlambat yakni pada Bulan Januari 2008, Proses pencairan dana yang terlambat menyebabkan masyarakat meminjam pinjaman lain dimana persentasenya sebesar 59,1% dan 43,2% diantaranya menunggak. Pengawasan dan pelaporan yang rendah semakin meningkatkan terjadinya tunggakan dalam pengembalian dana KMN di Parit Malintang

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, pemilihan tempat penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*). Secara khusus alasan pemilihan lokasi penelitian di Nagari Sialang adalah diantara 5 Nagari pertama penerima dana KMN di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, Nagari Sialang merupakan Nagari yang memiliki penduduk terpadat (lampiran 3) dan merupakan satu dari 5 nagari pertama penerima dana KMN di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengalami penunggakan pengembalian kredit (lampiran 2).

Berdasarkan survei dan wawancara pendahuluan yang dilakukan dengan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, beserta ketua Pokja KMN, diketahui terdapat sepuluh kelompok pemanfaat dana Kredit Mikro Nagari yang mana kesepuluh kelompok tersebut bermasalah dalam hal pengembalian dana pinjaman atau terjadinya kredit macet.

Penelitian ini telah dilakukan selama satu bulan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang yang terhitung pada tanggal 18 Agustus s/d 17 September 2014.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case studi*) yaitu penelitian tentang suatu objek penelitian yang berkaitan dengan suatu fakta yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas dengan subjek penelitian individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu untuk dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir,2003:75).

Berdasarkan teori tersebut, kasus dalam penelitian ini adalah pengelolaan KMN di Nagari Sialang. Unit analisis pada penelitian ini adalah Pokja KMN di tingkat Nagari, maka dari itu data penelitian bersumber dari informasi yang berasal dari ketua Pokja KMN di Nagari Sialang.

C. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci yang terdiri dari pokja KMN, perangkat nagari yang di yakini mampu memberikan informasi tentang program KMN di Nagari Sialang dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari data yang tersedia di instansi-instansi terkait yaitu di Kantor Kredit Mikro Nagari (KMN), Kantor Wali Nagari, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Nagari (BPMPN), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Kantor Camat, dan hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

D. Topik Data

a. Mendeskripsikan pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari di Nagari Sialang, maka data yang di amati adalah sesuai dengan Juknis KMN Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Pelaksanaan, indikatornya adalah:

- a) Penyusunan dan pengajuan dokumen pencarian dana
- b) Proses pencarian dana KMN
- c) Prosedur pengembalian dana KMN
- d) Alokasi Pemanfaatan Dana KMN

2. Pengawasan

- a) Proses pengontrolan pemanfaatan dana KMN oleh POKJA dan wali jorong
- b) Sanksi oleh POKJA terhadap masyarakat yang terlambat mengembalikan kredit
- c) Sanksi dari pemerintah kepada POKJA yang terlambat mengembalikan kredit

3. Pelaporan

- b. Mendeskripsikan kasus penunggakan KMN di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX.

E. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Menurut Meleong (2003:25), analisa deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa deskripsi secara keseluruhan dari fenomena sosial yang ada di daerah penelitian. Hal ini dijelaskan masalah sebagai fokus studi penelitian, mengumpulkan data lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi, menyusun rekomendasi untuk penyajian sasaran mencapai tujuan tersebut yaitu dengan membuat gambaran deskripsi dari variabel-variabel yang sistematis.

Untuk mencapai tujuan pertama, yaitu mendeskripsikan pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Sialang dilakukan analisa deskriptif komparatif, ini ditujukan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses dari kegiatan dalam program kredit mikro nagari di Nagari Sialang mulai dari pelaksanaan, pengawasan, sampai pelaporan dibandingkan Petunjuk Teknis (Juknis KMN 2009).

Untuk mencapai tujuan kedua, yaitu mendeskripsikan alasan penunggakan dalam pengembalian KMN di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX dilakukan analisa data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara kepada masyarakat penerima dana KMN di Nagari Sialang.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Kapur IX berada pada >124 meter dpl yang merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas daerah sebesar 723,36 Km² dengan temperatur 37 C.

Dengan batas daerah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Propinsi Riau
- Sebelah Selatan dengan Kec. Bukit Barisan
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pasaman
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Pangkalan Koto Batu

Kecamatan Kapur IX memiliki nagari sebanyak 7 (tujuh) nagari yang terdiri dari Lubuk Alai, Koto Lamo, Muaro Paiti, Koto Bangun, Durian Tinggi, Galugua serta Sialang yang menjadi daerah penelitian dengan luas wilayah sebesar 117,00 Km².

Nagari Sialang terdiri dari 4 jorong yaitu: Jorong Sialang Atas, Jorong Sialang Bawah, Jorong Ronah Bengkek, dan Jorong Lubuk Koto. Secara terperinci Nagari Sialang mempunyai jarak tempuh ke beberapa daerah disekitarnya dapat dilihat sebagai berikut: 1). Waktu tempuh ke ibu kota Provinsi sekitar 6,5 jam dengan jarak tempuh 232 km, 2). Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten sekitar 3,5 jam dengan jarak tempuh 100 km, 3). Waktu tempuh ke kota Kecamatan sekitar 30 menit dengan jarak tempuh 12 km.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk di nagari Sialang berjumlah 5.656 jiwa dengan 1459 KK. Jumlah penduduk di nagari Sialang dilihat dari segi umur dapat dilihat pada Tabel1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Nagari Sialang.

No	Umur	Jumlah (jiwa)
1.	0 – 11 bulan	122
2.	1 – 6 tahun	745
3.	7 – 18 tahun	1339
4.	19 – 49 tahun	2442
5.	50 – 69 tahun	774
6.	> - 70 tahun	234
	Total	5656

Sumber: Profil Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX 2014

Berdasarkan Tabel diatas masyarakat di Nagari Sialang sebagian besar berada pada usia produktif. Banyaknya masyarakat pada usia produktif tentu akan menjamin tersedianya sumberdaya tenaga kerja yang memadai ditingkat nagari. Adapun jumlah rumah tangga miskin di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX pada tahun 2013 berdasarkan data profil nagari berjumlah 500 KK.

Menurut keterangan Wali Nagari Sialang, profil keluarga miskin Nagari Sialang dicirikan oleh kondisi sebagaimana yang tercantum dalam profil Rumah Tangga Miskin (RTM) yang dikeluarkan oleh BPS antara lain dengan menetapkan ukuran garis kemiskinan dengan menghitung komponen untuk makanan/pangan sebesar 2.100 kalori perkapita/hari (kira-kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki-laki dewasa). Nagari Sialang memang sangat serius dalam menangani permasalahan kemiskinan. Hal tersebut sudah dapat dilihat dari rendahnya angka kemiskinan di nagari Sialang.

3. Pertanian

Nagari Sialang merupakan daerah yang luas lahannya untuk sector pertanian, dimana masyarakat daerah Sialang memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang di miliki dengan melakukan usaha tani dengan bertanam berbagai jenis produksi, sebagian besar masyarakat Sialang mengusahakan padi sawah, perkebunan, peternakan. Sebagian besar jenis produksi yang di tanam dan di manfaatkan untuk konsumsi dan di pasarkan.

Luas lahan yang cukup besar juga di gunakan untuk usaha non pertanian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Penggunaan Tanah di Nagari Sialang

No	Penggunaan lahan	Keterangan (ha)
1.	Pemukiman	210
2.	Persawahan	246
3.	Perkebunan	3230
4.	Pertanian tanah kering & lading	250
5.	Hutan	10322
6.	Kolam/ tambak	15
7.	Padang ilalang/tempat gembala	190

Sumber : Profil Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX 2014

Usaha diatas merupakan usaha yang menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk di Nagari Sialang di samping berdagang, dan lain-lain. Dalam mengusahakan produksi tani mereka mengalami kendala terhadap permodalan yang mana modal adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting untuk tumbuh kembang usaha.

Oleh sebab itu petani yang tergabung dalam kelompok agar diharapkan nantinya kelompok tersebut dapat berperan besar dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam berusaha tani namun itu saja tidak cukup membantu mereka. Mereka masih membutuhkan lembaga-lembaga yang di tumbuh kembangkan dalam hal permodalan agar upaya persoalan keuangan tadi dapat teratasi.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Nagari Salang dapat dikatakan memadai, seperti adanya jalan raya. Untuk menunjang kelancaran hubungan tersebut didukung oleh sarana transportasi darat seperti mobil angkutan. Di samping itu, nagari Sialang terdapat 1 buah Bank Umum (BRI) dan lembaga keuangan lain seperti Lembaga Keuangan Masyarakat Agribisnis (LKM-A), Kredit Mikro Nagari (KMN).

Keberadaan lembaga-lembaga keuangan ini ditujukan untuk membantu masyarakat Nagari Sialang dalam hal pembiayaan dan menyimpan dana mereka. Sejauh ini, lembaga-lembaga keuangan yang ada tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat di daerah tersebut, meskipun prosedur peminjaman dan menabung yang di anggap masyarakat masih berat. Sebagai contoh, adanya

persyaratan agunan pada BRI atau untuk meminjam modal membutuhkan waktu yang lama.

B. Implementasi Program Kredit Mikro Nagari (KMN)

Program KMN merupakan program yang dirancang untuk mengikuti arahan kebijakan prioritas penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari pencapaian target Millenium Development Goals (MDGS). KMN (Kredit Mikro Nagari) adalah program yang diusulkan atas dasar komitmen dan inisiatif dari pemerintah propinsi ke Kabupaten yang selanjutnya di sosialisasikan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagari (BPMPN) dan diteruskan ke nagari dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di nagari (Sumodiningrat,2003).

Program Kredit Mikro Nagari pada intinya merupakan program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk memberikan stimulasi modal usaha bagi keluarga miskin ditingkat nagari agar mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Untuk memperlancar program ini maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan dana operasional kepada Pokja nagari sebesar Rp. 7.600.000 untuk jangka waktu satu tahun. Berdasarkan keterangan Pokja nagari Sialang, dana tersebut dialokasikan untuk honor Pokja dan operasional kegiatan (transportasi, konsumsi rapat, foto kopi, dll). Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) program KMN bahwa dana operasional pokja berjumlah Rp. 7.600.000, dimana dana operasional tersebut diterima oleh ketua pokja pada awal penerimaan dana KMN yaitu pada tahap pertama yang berjumlah Rp. 7.600.000 di terima secara tunai. (Juknis KMN,2009).

1. Pelaksanaan

a. Penyusunan dan Pengajuan Dokumen Pencairan Dana

Sebelum dokumen pencairan dana KMN diajukan, terlebih dahulu diadakan musyawarah nagari yang dihadiri oleh wali nagari beserta perangkat nagari, ninik mamak, ketua pokja, masyarakat yang akan di ajukan dalam

penerimaan dana kredit mikro nagari (KMN), serta pemuda-pemudi setempat dalam rangka membahas dan menetapkan masyarakat yang akan menerima dana KMN. Adapun kriteria calon penerima dana KMN adalah sebagai berikut : masyarakat menengah ke bawah yakni KK miskin 30% dan non KK miskin 70% dimana KK miskin berdasarkan kriteria dari BPS, masyarakat yang memiliki usaha atau penghasilan, memiliki kemauan dan kemampuan berusaha, penduduk asli nagari, dana diperuntuk bagi penambahan modal, tergabung dalam kelompok, memiliki sifat jujur berdasarkan penilaian wali jorong dan aparat nagari. Setelah ditetapkan daftar nama-nama penerima dana KMN oleh wali nagari, kemudian dokumen pencairan dana siap diajukan ke kabupaten yaitu kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagari (BPMPN).

Dokumen pencairan dana terdiri dari surat permohonan izin penyaluran dana KMN, Berita Acara Musyawarah Nagari, daftar nama-nama penerima dana KMN dari pokja, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). Dokumen pencairan dana diajukan oleh ketua pokja Nagari Sialang pada bulan Februari 2010 kepada kepala BPMPN Kabupaten Lima Puluh Kota, perihal: Mohon izin penyaluran dana KMN tahap I, diketahui Wali Nagari Sialang. Dokumen pencairan dana ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar dana KMN bisa dicairkan.

b. Proses Pencairan Dana KMN

1. Pencairan Dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Nagari (BPMPN) ke Pokja KMN Sialang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua BPMPN pada saat survei pendahuluan di peroleh informasi bahwa Kredit Mikro Nagari (KMN) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam hal permodalan untuk usaha yang produktif, yang mana dana KMN ini bersumber dari dana APBD. Dalam proses pencairan dana Kredit Mikro Nagari (KMN) terbagi atas dua tahap pencairan yang langsung di terima oleh Ketua pokja KMN Sialang pada waktu yang berbeda yang telah di ketahui oleh wali nagari Sialang. Pada awalnya rencana pencairan dana KMN tahap I sudah bisa di cairkan pada awal bulan Maret 2010, namun adanya keterlambatan dari

pihak pokja dalam melengkapi dan mengajukan syarat-syarat administrasi pencairan dana ke BPMPN, keterlambatan ini berawal dari keterlambatan ketua kelompok dalam melengkapi administrasi pencairan dana KMN, sehingga dana KMN Sialang tahap I bisa di cairkan pada akhir bulan april yaitu pada tanggal 28 April 2010 sebesar Rp. 150.000.000. Kemudian pencairan dana tahap II baru bisa dilakukan jika kredit tahap I telah disalurkan mencapai 90% dan jangka waktu pengembalian sudah sesuai dengan yang di rencanakan yang di tunjukkan dengan bukti-bukti tertulis yang dapat di pertanggung jawabkan. Pencairan dana tahap II sebesar Rp. 150.000.000 juga mengalami keterlambatan dari waktu yang seharusnya cair pada bulan April 2010, namun tertunda menjadi 1 (satu) bulan dari waktu yang seharusnya, dan bisa dicairkan pada bulan Mei 2010. Pada tahap tunggu terjadi keterlambatan karena adanya penunggakan dalam pengembalian dana KMN ke pokja, sehingga pokja tidak memiliki simpanan dana KMN yang akan di gulirkan pada tahap tunggu, sehingga tahap tunggu terlambat dalam menerima pinjaman dana KMN.

2. Pencairan Dana dari Pokja KMN Sialang ke Kelompok masyarakat Penerima Dana KMN.

Setelah pencairan dana KMN tahap I di terima ketua Pokja nagari Sialang dari kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Nagari (BPMPN) yaitu H. Jaswirianto, SE. MH, kemudian ketua pokja memberitahu ketua masing-masing kelompok agar mengambil dana pinjaman yang sebelumnya telah di ajukan berupa proposal untuk usaha ke kantor Kredit Mikro Nagari (KMN) Sialang yang bertempat di pasar Sialang. Dana pinjaman tersebut di salurkan kepada 10 (sepuluh) kelompok yang di wakili oleh ketua masing-masing kelompok masyarakat penerima dana KMN (lampiran 5).

Syarat yang harus ada sewaktu pencairan dana adalah mengisi Surat Perjanjian Bantuan (SPPB) dari pihak pertama yaitu pokja kepada ketua kelompok sebagai pihak kedua, yang ditanda tangani oleh ketua kelompok dan ketua pokja KMN Sialang. Selanjutnya ketua kelompok menerima kwitansi dari pokja berisi sejumlah dana yang di pinjam dan di tanda tangani oleh ketua kelompok di atas materai 6000, ini dilakukan untuk memperkuat status dana

bahwa dana ini bukan dana lepas tapi merupakan pinjaman yang harus di kembalikan, tanda tangan yang menyerahkan dalam hal ini adalah bendahara dan di ketahui oleh wali nagari Sialang.

Selanjutnya Pokja menyerahkan dana kredit mikro nagari (KMN) ini kepada ketua kelompok yang telah di tetapkan, dan sekaligus penjelasan pengembalian cicilan sebanyak 10–20 kali tergantung kesepakatan dengan masing-masing yang di mula pada bulan Juni 2010.

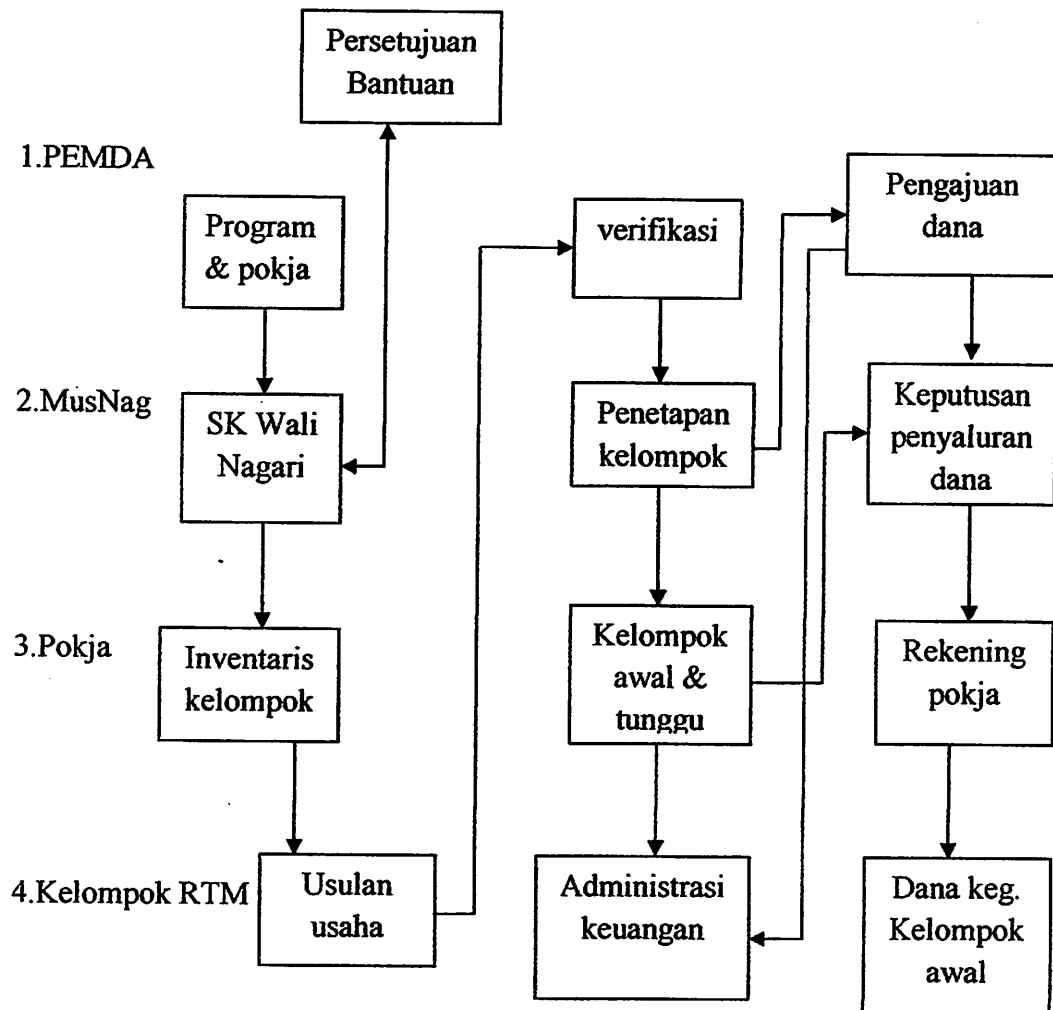
Peminjaman dana KMN ini kepada masyarakat miskin dibebankan jasa administrasi sebesar 5% selama pinjaman yang dipotong langsung pada waktu penyerahan kredit ke masyarakat, sedangkan dalam petunjuk teknis tidak ada aturan mengenai biaya tambahan. Berdasarkan informasi dari ketua pokja bahwa jasa administrasi ini digunakan untuk pengembangan dana KMN di nagari Sialang dan untuk jasa pengelola (pokja), yang mana jasa pengelola baru diterima satu kali selama program berjalan di luar dana Biaya Operasional (BOP) yaitu sebesar Rp.100.000/orang dan Rp.400.000 untuk biaya transportasi pokja.

Alur pencairan dana diatas berbeda dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh bupati kabupaten lima puluh kota dalam peraturan Bupati Lima Puluh Kota : 40 Tahun 2009 tentang penyaluran dana KMN. Pelaksanaan dilapangan terlihat lebih sederhana, pada prosedur yang telah ditetapkan, setelah ditetapkan nagari penerima dana KMN , maka wali nagari melaksanakan musyawarah nagari membahas tentang program dan membentuk pokja yang dihadiri oleh elemen masyarakat nagari (tokoh masyarakat, cadiak pandai, ninik mamak, bundo kanduang, dll), namun pelaksanaannya pokja dibentuk oleh wali nagari dengan menunjuk beberapa perangkat nagari dan orang-orang yang berpengalaman dalam organisasi nagari. Hasil wawancara dengan penanggung jawab sementara (PJS) wali nagari Bapak Asrizal mengatakan, pembentukan pokja tidak sesuai dengan aturan dalam juknis karena kondisinya sudah mendesak dan nama-nama pengurus Pokja harus segera diserahkan ke kabupaten. Setelah pengukuhan pokja, maka pokja bersama wali jorong melakukan inventaris kelompok serta mengklasifikasi jenis usaha yang ada dan membaginya berdasarkan kelompok.

3. Pencairan Dana KMN dari Kelompok ke Anggota

Setelah ketua kelompok menerima dana pinjaman Kredit Mikro Nagari (KMN) dari ketua pokja kredit mikro nagari (KMN) Sialang, maka dana tersebut telah bisa di jemput oleh anggota kelompok ke rumah ketua kelompok, dan ada juga ketua kelompok yang memberikan pinjaman tersebut ke pada masing-masing anggota dengan pergi ke rumah anggota apabila anggota belum mengambil pinjamannya. Dana yang di terima anggota semua sama yaitu Rp. 2.000.000 per anggota kelompok. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ke cemburuan sosial dalam kelompok tersebut. jumlah pinjaman yang diperoleh tergantung proposal yang diajukan masing-masing kelompok. Dalam meminjam dana KMN ini awalnya berkelompok, namun pada saat pengembalian cicilannya adalah masing-masing anggota kelompok tersebut. Karena dana yang di pinjam tersebut di gunakan untuk masing-masing anggota kelompok yang menerima dana pinjaman tersebut. sehingga apabila terjadi penunggakan dalam pengembalian cicilan, maka kelompok tidak bertanggung jawab. Namun, apabila ada salah satu anggota kelompok yang menunggak maka untuk selanjutnya kelompok tersebut belum bisa meminjam kembali sebelum masing-masing anggota melunasi tunggakannya.

Untuk lebih jelasnya bagaimana mekanisme dalam penyaluran dana Kredit Mikro Nagari (KMN) maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini sebagai berikut :



Gambar 1. Mekanisme Penyaluran Dana

Sumber : Pokja 2010

Keterangan gambar 1:

1. Pada tahap perencanaan yaitu adanya rekomendasi dari PEMDA berupa persetujuan bantuan untuk nagari dan menyiapkan dana sebesar dana yang diberikan provinsi kepada daerah untuk program KMN.
2. Dilakukan Musyawarah Nagari pada tanggal 20 November 2009, yaitu membahas tentang program dan membentuk pokja yang dihadiri oleh elemen masyarakat nagari (tokoh masyarakat, cadiak pandai, ninik mamak, bundo kandung, dll).

3. Wali nagari menyetujui program KMN dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terhadap pembentukan pokja nomor 3 tahun 2009 tentang pengukuhan pokja Nagari Sialang pada November 2009.
4. Pokja bersama wali jorong melakukan inventaris kelompok, masyarakat dibagi dalam kelompok dengan usaha yang berbeda-beda.
5. Masyarakat mengajukan usulan usaha kepada pokja melalui wali jorong yang dilakukan pada awal Desember sampai akhir Januari 2010.
6. Pada tahap persiapan pokja melakukan verifikasi terhadap usulan usaha yang diajukan masyarakat yang dibantu oleh wali jorong dan menetapkan masyarakat yang layak menerima dana KMN.
7. Masyarakat penerima dana pinjaman KMN dibagi dua kelompok yaitu kelompok awal dan kelompok tunggu mengajukan besarnya dana pinjaman kepada pokja.
8. Masyarakat penerima dana KMN harus menyelesaikan administrasi keuangan berupa penandatanganan surat perjanjian diatas materai yang diketahui oleh ahli waris.
9. Pada tahap pelaksanaan setelah administrasi keuangan selesai dan diajukan ke kantor BPMPN berupa dokumen pencairan dana, dana KMN sebesar Rp. 300.000.000 sudah bisa dicairkan pada tanggal 28 April 2010 ke rekening pokja.
10. Dana dicairkan ke kelompok akhir April sampai awal Mei setelah penyalurannya selesai untuk tahap I, maka dilanjutkan dengan pencairan dana untuk tahap II. Adapun proses penyaluran dana dari ketua pokja, kemudian ketua pokja memberikan dana pinjaman sesuai dengan jumlah yang di ajukan oleh kelompok yang bersangkutan, maka ketua pokja memberikan dana pinjaman tersebut kepada ketua kelompok, selanjutnya pada hari yang sama ketua kelompok membagikan kepada masing-masing anggota kelompoknya.

c. Prosedur Pengembalian Dana KMN

Pencairan dana KMN ke masyarakat terealisasi pada bulan April. Antara pencairan dana dengan pembayaran cicilan pertama diberi jarak 3 bulan, agar masyarakat dapat memutar uang tersebut untuk tambahan modal usaha terlebih

pengajuan dokumen pencairan dana, seharusnya nama-nama penerima dana KMN dibentuk dalam kelompok-kelompok usaha, disamping itu keterlambatan pencairan dana ke masyarakat dari tanggal yang ditetapkan diakibatkan karena keterlambatan dalam penyerahan dokumen pencairan dana. Perbedaan antara pelaksanaan dilapangan dengan aturan yang ditetapkan dalam juknis bisa dikatakan wajar selama tidak merubah tujuan dan sasaran dari program tersebut. Agar pelaksanaan program KMN dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran, maka diperlukan pengawasan agar permasalahan-permasalahan yang timbul dapat diatasi.

d. Alokasi Pemanfaatan Dana KMN

Alokasi pemanfaatan dana pinjaman Kredit Mikro Nagari (KMN), berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) KMN telah di jelaskan bahwa dana pinjaman Kredit Mikro Nagari (KMN) merupakan stimulasi modal bagi masyarakat miskin yang 100% penggunaan dana adalah untuk kegiatan produktif. Kegiatan produktif yang di maksud PTO adalah sebagai penambah modal usaha oleh masyarakat, namun kenyataannya dilapangan hanya sebagian kecil masyarakat yang menggunakan dana tersebut untuk usaha produktif, masyarakat lebih banyak menggunakan dana Kredit Mikro Nagari (KMN) untuk usaha non produktif. Dana KMN dialokasikan untuk kegiatan atau keperluan diluar jenis usaha yang dijalankan seperti angsuran kredit lain, biaya sekolah anak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada (lampiran 4).

Menurut Suprpto (1999), ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan penunggakan pengembalian dana bagi penerima dana bantuan berupa pinjaman baik individu maupun kelompok sebaiknya dikenai persyaratan supaya ada motivasi berusaha dan sudah memulai aktivitas produktif sehingga dana bantuan tidak hanya dianggap sekedar sebagai hadiah cuma-cuma melainkan sebagai kebutuhan yang pemanfaatannya harus di pertanggung jawabkan. Cara yang mungkin ditempuh adalah dengan memberikan ketentuan sepenuhnya dana digunakan untuk kegiatan produktif yang sudah ada. Jika dilihat berdasarkan teori tersebut penggunaan dana pinjaman 100% untuk kegiatan produktif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penunggakan pengembalian

kredit tidak bisa dilakukan oleh masyarakat penerima di Nagari Sialang, namun masih banyak di antara mereka menggunakan untuk kegiatan non produktif, hal tersebut tentu harus menjadi perhatian pemerintah agar mengeluarkan peraturan sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

2. Pengawasan

Menurut Steven (1989), pengawasan adalah sistem informasi yang memonitor rencana dan proses untuk menyakinkan bahwa rencana selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan memberi peringatan bila perlu sehingga tindakan pemulihan dapat dilakukan. Jadi pengawasan dan pembinaan ke lapangan perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dana di lapangan oleh tim pelaksana.

Di Nagari Sialang pengawasan penggunaan dana ini dilakukan oleh wali nagari, pokja dan TKPK propinsi. Pengawasan dilaksanakan untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha masyarakat dan pemanfaatan dana KMN oleh masyarakat. Sehingga hasil yang diharapkan keluarga miskin mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak tergantung lagi pada orang lain.

Dalam Petunjuk Teknis Operasional KMN telah ditentukan bahwa kegiatan pengawasan secara bertahap. Pengawasan dilakukan berjenjang dimulai pada tingkat propinsi sampai ketingkat masyarakat penerimaan dana KMN. Berdasarkan keterangan dari pokja nagari Sialang, kebanyakan yang melakukan pengawasan adalah pihak pokja beserta wali nagari. Pada dasarnya pengawasan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha masyarakat dan pemanfaatan dana KMN oleh masyarakat. Namun pokja merasa pengawasan terhadap program KMN tidak terlalu serius dilakukan oleh pihak kabupaten karena mereka melakukan pengawasan tidak rutin dan tidak tepat waktu. Lebih lanjut pokja menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kabupaten bukannya tidak ada, tetapi terkesan mereka hanya mengandalkan informasi yang diperoleh melalui keterangan pokja nagari. Artinya adalah pengawasan dilakukan tidak teratur, padahal pengawasan tersebut sangat penting bagi pelaksanaan sebuah program.

Dari hasil temuan dilapangan, ternyata pengawasan yang dilakukan oleh pokja tidak teratur. Menurut keterangan masyarakat penerima kredit, tidak ada pengawasan langsung yang dilakukan oleh pokja dari segi peninjauan terhadap perkembangan usaha masyarakat dengan adanya pinjaman tersebut. Sedangkan dalam petunjuk teknis pokja harus mengawasi setiap 2 minggu. Tidak adanya pengawasan rutin dari pihak pengelola dapat memicu terjadinya penunggakan pengembalian kredit. Dalam pengelola dana KMN terdapat sanksi yang diberikan kepada masyarakat apabila terjadi penunggakan pengembalian kredit. Jika tunggakan melebihi 3 bulan, maka akan diberikan surat peringatan (SP 1,2,3) dan jika tetap tidak ada upaya dari masyarakat untuk melunasi tunggakannya maka diberikan surat panggilan. Sedangkan sanksi yang diberikan oleh Kabupaten kepada Pokja berupa surat teguran apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan atau penyimpangan dalam pengelolaan. Namun realita dilapangan, sanksi tersebut tidak terlaksana sesuai dengan yang di buat. Masyarakat yang menunggak dalam membayar cicilannya tidak dibebani karena masyarakat sendiri merasa diberatkan dengan adanya bunga tersebut. Sebelumnya masyarakat telah menyetujui aturan pemberian bunga pinjaman jika terjadi pengggakan pengembalian kredit pada saat meminjam dana KMN, namun setelah masalah pengggakan kredit terjadi seolah tidak ada yang bertanggung jawab terhadap aturan yang telah ditetapkan tersebut. Dari hasil wawancara dari perangkat nagari dan pokja didapatkan informasi bahwa mereka juga tidak bisa terlalu memberatkan masyarakat karena untuk membayar cicilan saja sudah bermasalah apalagi di bebaskan berupa bunga pinjaman, hal ini akan semakin memberatkan masyarakat. Jadi, sanksi yang di buat tidak dapat diterapkan dengan baik, hal ini di sebabkan adanya rasa tidak enak atau adanya saling tenggang-menenggang dalam hidup bernagari. Untuk melihat kesesuaian pengawasan program KMN di Nagari Sialang dengan Petunjuk teknis program KMN tahun 2009 dapat dilihat berdasarkan Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Kesesuaian Tahap Pengawasan Program KMN di Nagari Sialang dengan PTO KMN

No	Pengawasan	PTO (Petunjuk Teknis Operasional)	Temuan dilapangan	Keterangan
1.	Pengawasan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten	1 kali dalam sebulan	TKPK Kabupaten datang dalam jangka waktu yang tidak menentu	Tidak sesuai, karena pengawasan oleh TKPK terhadap pokja Nagari tidak teratur
2.	Pengawasan oleh Pokja Nagari terhadap kelompok tunggu	2 kali dalam sebulan bersamaan dengan pengawasan terhadap kelompok penerima KMN	Pokja nagari tidak melakukan pengawasan terhadap kelompok tunggu	Tidak sesuai, menurut pokja tidak ada pengawasan terhadap kelompok tunggu karena mereka belum meminjam
3.	Pengawasan oleh Pokja terhadap kelompok penerima dana KMN	2 kali dalam sebulan	Pokja nagari mengawasi kelompok penerima tidak dalam waktu yang di tentukan dan tidak teratur	Tidak sesuai, karena pengawasan dari pihak pokja tidak teratur

Dalam Petunjuk Teknis Operasional KMN telah ditentukan bahwa kegiatan pengawasan secara bertahap. Pengawasan dilakukan mulai pada tingkat propinsi sampai ketingkat masyarakat penerima dana KMN. Berdasarkan keterangan dari pihak Pokja nagari Sialang, kebanyakan yang melakukan pengawasan adalah pihak Pokja beserta wali Nagari. Pada dasarnya pengawasan ini dilakukan adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha masyarakat dan pemanfaatan dana KMN oleh masyarakat. Tetapi Pokja merasa pengawasan terhadap program KMN tidak terlalu serius dilakukan oleh pihak Kabupaten karena mereka melakukan pengawasan tidak rutin dan tidak tepat waktu seperti

yang sudah diatur pada Petunjuk Teknis Operasional KMN. Lebih lanjut Pokja menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kabupaten bukannya tidak ada, tetapi terkesan mereka hanya mengandalkan informasi yang diperoleh melalui keterangan Pokja Nagari. Artinya adalah pengawasan dilakukan tidak teratur, padahal pengawasan tersebut juga sangat penting bagi pelaksanaan sebuah program.

Dari hasil temuan dilapangan, ternyata pengawasan yang dilakukan oleh Pokja tidak teratur. Menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat penerima dana KMN, tidak ada pengawasan langsung dari pihak Pokja dari segi peninjauan terhadap perkembangan usaha masyarakat dengan adanya pinjaman tersebut. padahal menurut yang seharusnya Pokja melakukan pengawasan setiap dua minggu sekali. Hal ini tentu akan menimbulkan persepsi pada masyarakat peminjam bahwa KMN tersebut tidak dibayarpun tidak apa-apa, maka dari itulah agar tidak timbul pemikiran-pemikiran yang demikian kegiatan pengawasan perlu untuk lebih ditingkatkan.

Dari Tabel 4 diatas terlihat terdapat ketidaksesuaian kegiatan pengawasan di lapangan dengan aturan yang ditetapkan dalam juknis. Hal ini diakibatkan kurangnya koordinasi antar stakeholder sehingga pengontrolan pengelolaan tidak terlaksana dengan baik. Dari paparan tabel diatas terlihat bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang penting dalam pelaksanaan program KMN. Disamping pengawasan juga dibutuhkan kegiatan pelaporan untuk memudahkan dalam mengevaluasi pelaksanaan program KMN.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan penting dalam pelaksanaan program KMN. Melalui pelaporan maka pemerintah kabupaten dapat mengetahui sejauh mana perkembangan pengelolaan dana KMN. Pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari (KMN) ini dilaporkan minimal 1 kali 3 bulan ke kabupaten. Kegiatan yang dilaporkan yaitu seluruh rangkaian program mulai dari awal sampai akhir yaitu laporan tentang pembentukan pokja yang disahkan lewat keputusan wali nagari, memberikan laporan tentang dokumentasi pencairan dana

antara lain memberikan daftar nama-nama kelompok masyarakat miskin penerima dana KMN, memberikan laporan bahwa surat perjanjian penguatan modal usaha (SPPMU), memberikan laporan pengelolaan KMN dan juga yang dilaporkan adalah persentase cicilan tiap bulannya. Dari laporan tersebut akan terlihat kemajuan dari dana KMN tersebut, jika terdapat kendala atau masalah dalam pelaksanaan program KMN maka dapat dicarikan solusinya. Laporan program KMN ini dilakukan sebulan sekali oleh pokja kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Nagari (BPMPN) kabupaten. Laporan tersebut adalah laporan mengenai perkembangan KMN Nagari Sialang. Untuk melihat kesesuaian tahap pelaporan program KMN di Nagari Sialang dengan PTO KMN dapat dilihat berdasarkan Tabel 6 berikut:

Tabel 5. Kesesuaian Tahap Pelaporan Program KMN di Nagari Sialang dengan PTO KMN

Pelaporan	PTO (Petunjuk Teknis Operasional)	Temuan di lapangan	Keterangan
Pojka kepada pemerintah kabupaten (BPMPN)	Dilakukan 1 kali dalam sebulan	1 kali dalam 3 bulan dengan mengajukan laporan perkembangan pokja KMN Nagari Sialang	Tidak sesuai

Pelaksanaan program KMN di Nagari Sialang terdiri dari beberapa tahapan yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan kerjasama Wali Nagari, Pokja, Wali jorong beserta masyarakat. Namun masih saja terdapat beberapa kegiatan yang berbeda oleh KMN di Nagari Sialang dengan PTO KMN. Ketidak sesuaian tersebut terdiri atas penyusunan dan pengajuan dokumen, proses pencairan dana KMN, pengawasan serta pelaporan.

Pada tahap pelaksanaan terdiri dari penyusunan dan pengajuan dokumen, dimana dalam penyusunan dan pengajuan dokumen tersebut ada beberapa berkas yang mesti dilengkapi antara lain surat permohonan izin penyaluran dana, berita acara musyawarah nagari, daftar nama-nama kelompok penerima dana KMN,

surat perjanjian penguatan modal (SPPMU). Semua berkas telah dilengkapi, namun terjadi keterlambatan penyerahan dokumen yang seharusnya diserahkan pada awal Maret 2010 tapi diundur pada akhir April 2010. Keterlambatan ini disebabkan terlambatnya pihak kabupaten menyampaikan informasi ke nagari Sialang, sehingga terlambatnya pengumpulan semua berkas dari masyarakat sebagai penerima dana KMN. Akibat keterlambatan ini, maka proses pencairan dana KMN juga mengalami keterlambatan dari waktu yang seharusnya dana cair pada akhir April 2010, namun dilapangan terdapat pelaksanaan kredit mikro nagari Sialang tidak sesuai dengan petunjuk teknis operasional program KMN tahun 2009.

Pada tahap pengawasan, ada beberapa yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis operasional KMN antara lain sebagai berikut : pengawasan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), seharusnya melakukan pengawasan 1kali dalam sebulan, namun dilapangan pengawasan oleh TKPK tersebut hampir tidak ada dilakukan dan tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan. Pengawasan pokja terhadap masyarakat penerima dana KMN yang seharusnya 2 kali dalam sebulan, namun dilapangan pengawasan tersebut kurang maksimal karena pengawasan hanya dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima KMN tanpa adanya melihat secara langsung kelapangan. Sanksi yang diberikan bagi masyarakat penerima dan KMN yang mengalami penunggakan pengembalian kredit tidak berjalan dengan baik karena adanya rasa segan dalam hidup bernagari, sehingga sanksi yang berlaku terkesan lemah akibat adanya rasa segan menyegani hidup dinagari. Sehingga pengawasan yang dilakukan terhadap program kredit mikro nagari KMN di Nagari Sialang kurang maksimal karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO KMN).

Pada tahap pelaporan terdapat ketidaksesuaian yang ada dilapangan dengan petunjuk teknis operasional kredit mikro nagari (PTO KMN) yaitu ; pelaporan dari pokja kepada Pemerintah Kabupaten (BPMPN) seharusnya dilaporkan dalam sebulan 1 kali, namun dilapangan pelaporan dilakukan 1 kali dalam 3 bulan dengan alasan untuk menghemat waktu dan biaya transportasi ke kantor Badan

Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Nagari (BPMPN), maka dilakukan 3 bulan sekali. Sehingga pelaporan kredit mikro nagari di nagari Sialang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Kredit Mikro Nagari (PTO KMN 2009). Dari secara keseluruhan pelaksanaan kredit mikro nagari Sialang kurang maksimal karena dalam pelaksanaannya ada ketidak sesuai dengan petunjuk teknis kredit mikro nagari (PTO KMN).

C. Kasus Penunggakan KMN di Nagari Sialang

Besarnya jumlah pinjaman kredit yang diberikan oleh Pokja tergantung dari jumlah permintaan dan penilaian kemampuan pembayaran seorang penerima, namun pinjaman kredit yang besar juga mengakibatkan beban angsuran yang besar pula bagi penerima Kredit Mikro Nagari (KMN) dalam pelunasannya sehingga menimbulkan resiko terhambatnya pengembalian kredit oleh penerima.

Berdasarkan dilapangan jumlah pinjaman yang diberikan kepada penerima berbeda-beda sesuai dengan usulan proposal pinjaman dan juga sesuai dengan kebutuhan pinjaman untuk usaha penerima dan modal yang tersedia. Di Nagari Sialang tidak ada penerima dana yang menerima pinjaman dibawah 1 juta, jumlah pinjaman rata-rata 2 juta sampai 5 juta karena kebutuhan modal usaha mereka lumayan besar.

Penerima yang mendapatkan pinjaman adalah sebagian besar masyarakat yang telah memiliki usaha. Berdasarkan wawancara dengan pokja penerima tersebut memang disengaja persentasenya tertinggi non KK miskin karena berdasarkan pengalaman kredit sebelumnya dana diberikan kepada KK miskin tapi masih banyak dana yang tidak kembali, hal ini terjadi karena adanya pemutihan terhadap dana yang diberikan, masyarakat menganggap dana yang diberikan adalah hak mereka karena dana tersebut dari pemerintah. Dengan diberikan kepada non KK miskin pokja berharap pengembalian dana Kredit Mikro Nagari (KMN) ini akan lancar sesuai dengan harapan, namun kenyataannya dilapangan banyak penerima yang menunggak. Penerima kredit untuk tahap I terdapat 27 orang yang mengalami penunggakan pengembalian Kredit Mikro Nagari (KMN) (lampiran 4). Hal ini terlihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 6. Jumlah Peminjam yang Menunggak

Jumlah pinjaman (juta rupiah)	Menunggak Jumlah (orang)	Proporsi (%)
>2 juta	23	85,2
4 juta	3	11
5 juta	1	3,7
Total	27	100

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa masyarakat penerima pinjaman dana Kredit Mikro Nagari (KMN) Sialang adalah sebagai berikut : pinjaman 2-3 juta ada 23 orang (85,2 %), pinjaman 4 juta ada 3 orang (11 %) dan pinjaman 5 juta ada 1 orang (3,7 %). Masyarakat penerima yang menunggak dalam hal pengembalian kredit lebih banyak adalah masyarakat yang memperoleh pinjaman 2-3 juta yaitu 85,2 %.

Masyarakat yang mengajukan pinjaman dana Kredit Mikro Nagari (KMN) menyatakan bahwa, alokasi penggunaan dana kredit Mikro Nagari (KMN) tersebut digunakankan 100 % untuk usaha produktif dalam hal ini digunakan untuk menambah modal usaha yang sedang dijalankan. namun pada kenyataannya dana Kredit Mikro Nagari (KMN) digunakan untuk non produktif seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk biaya sekolah dan untuk bayar kredit lain).

Kesulitan permodalan yang dialami petani akan mempengaruhi ruang gerak aktivitas produksi usahatani dari petani. Salah satu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian akan berjalan lambat. Untuk produksi yang baik, petani harus lebih banyak mengeluarkan uang sarana produksi. Petani dengan uang banyak akan menghasilkan produksi yang lebih tinggi (Mosher,1989:44). Ciri khas kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan pendapatan dan pengeluarannya. Pendapatan petani hanya diterima setiap musim panen, sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap

minggu, atau kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak sebelum panen tiba (Mubyarto, 1989:35). Penciptaan modal untuk petani dapat dilakukan dengan menyisihkan kekayaan (menabung), akan tetapi pada umumnya jarang memiliki kapital tinggi. Hal ini mengakibatkan investasi untuk usahatani selanjutnya sangatlah kecil karena akumulasi modal sangatlah sulit untuk dilakukan. Atas dasar inilah, Pemerintah meluncurkan kebijakan perkreditan untuk membantu petani kecil mendapatkan modal sekaligus mengembangkan usahanya. Untuk lebih jelasnya alokasi penggunaan dana kredit mikro nagari Sialang dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Alokasi Penggunaan kredit Mikro Nagari di Nagari Sialang

No	Keterangan	Penerima dana yang menunggak (orang)	%
1	Produktif	11	41
2	Non produktif	16	59
	Total	27	100

Dari Tabel 7 terlihat bahwa penerima dana Kredit Mikro Nagari (KMN) yang menunggak ada 27 orang, yang mana pada awalnya dana yang di pinjam di alokasikan untuk usaha produktif yaitu untuk menambah modal usaha yang sedang diusahakan. Namun ditemukan di lapangan hanya 11 orang penerima dana kredit mikro nagari yang meminjam menggunakan dana tersebut untuk menambah modal usaha. Sedangkan penerima dana yang menunggak sebanyak 16 orang digunakan untuk keperluan lain. Penerima yang menunggak tersebut menggunakan pinjaman kredit untuk di luar modal usaha, yakni digunakan memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Adapun kebutuhan rumah tangga yang dipenuhi adalah membeli keperluan harian dalam rumah tangga, membayar uang sekolah anak, untuk membayar kredit lain seperti kredit motor, julo-julo yang lebih mendesak.

Menurut Handayani (2010), penyimpangan penggunaan kredit dari produksi ke non produktif (konsumtif) akan menimbulkan bencana “mati langkah” bagi usaha nasabah yang berakhir pada kemacetan usaha. Penyimpangan

penggunaan kredit ini disebabkan karena lemahnya analisa dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh pihak pengurus/pengelola. Lemahnya analisa ini sering terjadi terhadap analisa karakter nasabah/anggota, pada saat pengajuan kredit calon nasabah/anggota selalu menyatakan tujuan peminjaman kreditnya untuk modal usaha, namun pada kenyataannya kredit tersebut hanya sebagian yang digunakan untuk modal usaha dan sebagian lagi dipergunakan untuk biaya sekolah anak, membayar kredit lain, dan membeli kebutuhan lainnya. Dari 27 orang yang mengalami penunggakan kredit mikro nagari ada 8 (delapan) orang yang memiliki kredit lain yang harus di bayar karena lebih mendesak seperti kredit pembayaran cicilan motor, cicilan hutang di bank, serta julo-julo. Sedangkan yang menggunakan dana pinjaman untuk biaya sekolah anak ada 6 (enam) orang, dan yang menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari ada 8 (delapan) orang.

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahawa penerima yang mengalami penunggakan pengembalian kredit sebagian besar adalah orang yang menggunakan kreditnya yang tidak tepat yang seharusnya untuk usaha produktif, namun realitanya di lapangan penggunaan kredit menyimpang dari tujuan awal, dan digunakannya untuk kebutuhan sehari-hari/ kebutuhan mendesak diluar modal usaha sehingga peminjam hanya terlepas sesaat dari kebutuhan mendesak namun tidak punya modal untuk kebutuhan jangka panjang.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan sabagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum program KMN di Nagari Sialang memang belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari ada beberapa kegiatan yang kurang sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yaitu 1) keterlambatan penyusunan dan pengajuan dokumen pencairan dana KMN yang mengakibatkan ketidaklancaran penyaluran kredit, 2) ketiadaan pemberian sanksi, dan 3) kelemahan pengawasan, serta pelaporan yang tidak tepat waktu.
2. Kasus penunggakan KMN di Nagari Sialang disebabkan oleh penggunaan dana KMN yang tidak tepat.

B. Saran

Dari kesimpulan yang didapat, maka disarankan agar ;

1. Pelaksanaan program KMN sebaiknya dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional pelaksanaan program yang telah ditetapkan Pemerintah. Disamping itu perlu dilakukan pengawasan yang kuat dari nagari dan jorong agar pelaksanaan program bisa lebih terarah sehingga program yang diberikan kepada masyarakat tidak sia-sia.
2. Diberlakukan aturan dan sanksi yang tegas, sehingga resiko yang timbul dalam pelaksanaan dan pengembalian dana KMN dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Casley J. Denis dan Khirsna Kumar, 1991. *Pemantauan dan Evaluasi Proyek Pertanian*. Universitas Indonesia Press : Jakarta.
- Daniel, Moehar. 2007. *Lembaga Untuk Memacu Ekonomi Masyarakat Pedesaan*. Tabloid pertanian Edisi No.43/September/Tahun-V/2007.
- Hadiwidjaja dan Wirasasmita. 2002. *Analisis Kredit*. Pionir Jaya. Bandung.
- Herwin, Rika. 2012. *Evaluasi Program Kredit Mikro Nagari (KMN) Di Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.
- Jhingan. 1999. *Membangun Pertanian Masa Depan*. Aneka Ilmu: Semarang.
- Juknis Kredit Mikro Nagari (KMN). 2009. Kabupaten Lima Puluh Kota
- Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. 2004. *Pengusaha Kecil Penting dan Kompleksitas Masalahnya*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mubyarto. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Aditya Media Jakarta.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta.
- Moloeng. J. Lexi. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mosher, A.T. 1965. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. CV. Yasaguna. Jakarta.
- Mosher. 1989. *Mengerjakan dan Membangun Pertanian*. Jasa Guna. Jakarta.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Cetakan ke 5. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nurmanaf, A. Rozani. 2003. *Partisipasi Masyarakat Petani Terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 1 No.2. Juni 2003. Hal 110-122.
- Pakpahan. A. 1993. *Kelembagaan Inovatif dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Makalah PERHEPI : Jakarta.
- Partomo, Sartika, T. dan Abd. Ranchman, S. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*. Ghalia Indonesia : Jakarta.

- Soekartawi, dkk. 1989. *Pembangunan Pertanian Untuk Mengentaskan Kemiskinan*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2003. Pangan Media Komunikasi dan Informasi. Edisi No.41/XII/Juli/2003.
- Sumodiningrat, G. 2003. Peranan Lembaga Keuangan Makro Dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait Dengan Kebijakan Otonomi Daerah. www.ekonomirakyat.go.id
- Surachman, Winarno. 1982. *Dasar dan Tehnik Researc Pengantar Metodologi Ilmiah*. Reksakarya. Bandung.
- Suyatno, T dkk. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Untung, Budi. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Penerbit Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Weni Sartika Dewi. 2008. *Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari Parit malintang Kabupaten Padang Pariaman*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.
- Wijono Wirjo Wielojo. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkrit Mata Rantai Kemiskinan*. Kajian Ekonomi dan Keuangan (Edisi Khusus). Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional. Departemen Keuangan.
- Yulita, Dhien. 2012. *Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN) Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.

Lampiran 1. Matrik Data Set

No.	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Indikator	Sumber Data	Analisis Data
1	Mendeskripsikan pelaksanaan Program KMN di Nagari Sialang Kec.Kapur IX	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan pengajuan dokumen pencairan dana 2. Proses pencairan dana KMN 3. Prosedur pengembalian dana 4. Alokasi pemanfaatan dana KMN 	Pengelola Pokja	Deskriptif Kualitatif (membandingkan pelaksanaan di lapangan dengan Juknis KMN)
		Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengontrolan pemanfaatan dana KMN oleh POKJA 2. Sanksi oleh POKJA terhadap masyarakat yang terlambat mengembalikan kredit 3. Sanksi dari pemerintah kepada POKJA yang terlambat mengembalikan kredit 	Pengelola Pokja	Deskriptif Kualitatif (membandingkan pelaksanaan di lapangan dengan Juknis KMN)
		Pelaporan	Proses pelaporan	Pengelola Pokja	Deskriptif Kualitatif (membandingkan pelaksanaan di lapangan dengan Juknis KMN)
2	Mendeskripsikan kasus penunggakan KMN di			Pengelola Pokja Masyarakat	Deskriptif Kualitatif

	nagari Sialang			penerima dana KMN yang menunggak	
--	----------------	--	--	--	--

Lampiran 2. Daftar Angsuran KMN Nagari Sialang ,Kecamatan Kapur IX Tahun 2013

LAPORAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN KREDIT MIKRO NAGARI

No	Jenis Usaha	Alokasi Pinjaman	Pengembalian Lancar/Tidak Lancar	Jumlah Pengembalian	Jumlah Tunggakan	Keterangan
1	Jualan	2.000.000	Tidak lancar	1.833.000	167.000	1 bulan
2	Tani	2.000.000	Tidak lancar	1.666.000	334.000	2 bulan
3	Tani	2.000.000	Tidak lancar	1.332.000	668.000	1 bulan
4	Tani	2.000.000	Tidak lancar	1.499.000	501.000	2 bulan
5	Tani	3.000.000	Tidak lancar	375.000	1.625.000	13 bulan
6	Tani	3.000.000	Tidak lancar	2.875.000	125.000	1 bulan
7	Tani	4.000.000	Tidak lancar	3.833.000	167.000	1 bulan
8	Tani	3.000.000	Tidak lancar	1.625.000	1.375.000	11 bulan
9	Jualan	4.000.000	Tidak lancar	2.497.000	1.503.000	8 bulan
10	Tani	3.000.000	Tidak lancar	2.750.000	250.000	2 bulan
11	Tani	4.000.000	Tidak lancar	2.551.000	1.449.000	12 bulan
12	Tani	5.000.000	Tidak lancar	2.502.000	2.502.000	5 bulan
13	Tani	2.000.000	Tidak lancar	1.165.000	1.169.000	4 bulan
14	Tani	2.000.000	Tidak lancar	831.000	1.169.000	4 bulan
15	Tani	2.000.000	Tidak lancar	998.000	1.002.000	5 bulan
16	Tani	2.000.000	Tidak lancar	1.666.000	334.000	1 bulan
17	Tani	2.000.000	Tidak lancar	330.000	1.670.000	9 bulan
18	Tani	2.000.000	Tidak lancar	1.666.000	334.000	1 bulan
19	Jualan	2.000.000	Tidak lancar	1.332.000	668.000	3 bulan
20	Jualan	2.000.000	Tidak lancar	831.000	1.169.000	6 bulan
21	Jualan	2.000.000	Tidak lancar	831.000	1.169.000	6 bulan
22	Jualan	2.000.000	Tidak lancar	831.000	1.169.000	6 bulan
23	Tani	2.000.000	Tidak lancar	1.165.000	835.000	4 bulan
24	Tani	2.000.000	Tidak lancar	1.666.000	334.000	1 bulan

25	Tani	2.000.000	Tidak lancar	1.666.000	334.000	1 bulan
26	Tani	2.000.000	Tidak lancar	998.000	1.002.000	5 bulan
27	Tani	2.000.000	Tidak lancar	831.000	1.169.000	6 bulan
Total					24.193.000	

Sumber : Pokja KMN Sialang, Kecamatan Kapur IX, 2014

Lampiran 3. Nagari penerima program KMN di Kecamatan Kapur IX Tahun 2013

No	Nama Nagari	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Muaro Paiti	2.999	2.902	5.901
2	Koto Bangun	1.893	1.817	3.710
3	Sialang	3.359	3.251	6.610
4	Koto lamo	1.682	1.483	3.165
5	Gelugur	1.151	1.066	2.217
Total		11.084	10.519	21.603

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, 2014

Lampiran 4: Realisasi pinjaman KMN responden berdasarkan jenis usaha, alokasi dana serta alasan menunggak

No	Jumlah pinjaman (Rp)	Dana yang telah dikembalikan (Rp)	Jumlah tunggakan (Rp)	Jenis usaha	Alokasi dana	Alasan menunggak
1	2.000.000	1.833.000	167.000	Jualan	Non Produktif	Kredit lain
2	2.000.000	1.666.000	334.000	Tani	Non produktif	Kredit lain
3	2.000.000	1.332.000	668.000	Tani	Non produktif	Biaya sekolah
4	2.000.000	1.499.000	501.000	Tani	Non produktif	Biaya sekolah
5	2.000.000	375.000	1.625.000	Tani	Non produktif	Kebutuhan sehari-hari
6	3.000.000	2.875.000	125.000	Tani	Produktif	
7	4.000.000	3.833.000	167.000	Tani	Produktif	
8	3.000.000	1.625.000	1.375.000	Tani	Produktif	
9	4.000.000	2.497.000	1.503.000	Jualan	Produktif	Kebutuhan sehari-hari
10	3.000.000	2.750.000	250.000	Tani	Non produktif	Kebutuhan sehari-hari
11	4.000.000	2.551.000	1.750.000	Tani	Non produktif	Biaya sekolah
12	5.000.000	2.502.000	2.498.000	Tani	Produktif	
13	2.000.000	1.165.000	835.000	Tani	Non produktif	Kebutuhan sehari-hari
14	2.000.000	831.000	1.169.000	Tani	Produktif	
15	2.000.000	998.000	1.002.000	Tani	Non produktif	Kredit lain
16	2.000.000	1.666.000	334.000	Tani	Non produktif	Kredit lain
17	2.000.000	330.000	1.670.000	Tani	Non produktif	Kebutuhan sehari-hari
18	2.000.000	1.666.000	334.000	Tani	Produktif	Kredit lain
19	2.000.000	1.332.000	668.000	Tani	Produktif	Kredit lain
20	2.000.000	831.000	1.169.000	Tani	Produktif	Kebutuhan sehari-hari
21	2.000.000	831.000	1.169.000	Tani	Non produktif	Biaya sekolah

22	2.000.000	831.000	1.169.000	Tani	Non produktif	Biaya sekolah
23	2.000.000	1.165.000	835.000	Tani	Produktif	Kredit lain
24	2.000.000	1.666.000	334.000	Tani	Produktif	Kredit lain
25	2.000.000	1.666.000	334.000	Tani	Non produktif	Kebutuhan sehari-hari
26	2.000.000	998.000	1.002.000	Tani	Non produktif	Biaya sekolah
27	2.000.000	831.000	1.169.000	Tani	Non produktif	Kebutuhan sehari-hari

Sumber : Pokja KMN Sialang, Kecamatan Kapur IX, 2014

Lampiran 5. Daftar Nama Kelompok Penerima Dana KMN Tahun 2009

Kelompok Penerima Awal

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Usaha	Jumlah Penerima (Rp)
1.	Bouginville	Sialang Bawah	Kebun gambir, kebun karet, pertanian, jualan	Rp. 2.000.000
2.	Mawar	Sialang Atas	Kebun gambir, kebun karet, pertanian, jualan	Rp. 2.000.000
3.	Melati 1	Sialang Atas	Kebun gambir, kebun karet, pertanian, jualan	Rp. 2.000.000
4.	Melati 2	Ronah Bengkek	Kebun gambir, kebun karet, pertanian, jualan	Rp. 2.000.000
5.	Melati 3	Lubuk Koto	Kebun gambir, kebun karet, pertanian, jualan	Rp. 2.000.000
6.	Anggrek 1	Sialang Bawah	Kebun gambir, kebun karet, pertanian, jualan	Rp. 2.000.000
7.	Anggrek 2	Sialang Atas	Kebun gambir, kebun karet, pertanian, jualan	Rp. 2.000.000
8.	Anggrek 3	Ronah Bengkek	Kebun gambir, kebun karet, jualan	Rp. 2.000.000
9.	Kamboja	Ronah Bengkek	Kebun gambir, kebun karet, pertanian, jualan	Rp. 2.000.000
10.	Teratai	Lubuk Koto	Kebun gambir, kebun karet, jualan	Rp. 2.000.000

Sumber : Kantor Wali Nagari Sialang, 2014